



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

BUMN UNTUK
INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041

TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

KEMENTERIAN BUMN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara/BUMN sebagai salah satu entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 7 Mei 2025

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	5
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	6
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
III. NERACA.....	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
A. PENJELASAN UMUM	12
1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN	12
2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	15
3. BASIS AKUNTANSI	15
4. DASAR PENGUKURAN	16
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	22
1. PENDAPATAN.....	23
2. BELANJA	26
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	31
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	31
2. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	31
3. Piutang Bukan Pajak	32
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	36
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	36
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.....	36
7. Persediaan	37
8. Tanah	37
9. Peralatan dan Mesin	40
10. Gedung dan Bangunan	42
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan	42
12. Aset Tetap Lainnya.....	42
13. Konstruksi Dalam Pengerjaan	43
14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
15. Properti Investasi.....	44
16. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	44

17. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	44
18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	45
19. Aset Tak Berwujud	45
20. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	49
21. Aset Lain-lain.....	50
22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	51
23. Utang Kepada Pihak Ketiga	51
24. Pendapatan Diterima Dimuka.....	53
25. Ekuitas.....	54
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	55
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	55
2. Beban Pegawai.....	56
3. Beban Persediaan	57
4. Beban Barang dan Jasa	57
5. Beban Pemeliharaan.....	59
6. Beban Perjalanan Dinas	60
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	60
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	61
9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	61
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	62
1. Ekuitas Awal.....	62
2. Surplus (Defisit) LO	62
3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	62
4. Transaksi Antar Entitas	62
5. Ekuitas Akhir	63
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	64
1. KERANGKA PENDANAAN 2025-2029	64
2. LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024	65
3. KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BARANG ASET TETAP/ATB.....	73



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.830.339.220 atau mencapai 108,05% dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp10.948.482.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp297.011.269.745 atau mencapai 96,43% dari alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp308.016.126.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.042.150.071.950 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp12.219.523.892, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.956.852.991.759, Properti Investasi (neto) sebesar Rp17.348.847.589, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp18.149.544 dan Rp55.710.559.166.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp42.362.731.551 dan Rp1.999.787.340.399.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.315.299.032, sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp280.255.939.575 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(274.940.640.543).

Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(610.611.781) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(274.330.028.762).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 sebesar Rp1.989.182.706.494, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(274.330.028.762), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp(328.335.858) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp285.262.998.525 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.999.787.340.399.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Neraca per 31 Desember 2024. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024				31 DESEMBER 2023			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA		10.948.482.000	11.830.339.220	881.857.220	108,05%	1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	297,32%
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		10.948.482.000	11.830.339.220	881.857.220	108,05%	1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	297,32%
A.1.2	HIBAH		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A.11)			10.948.482.000	11.830.339.220	881.857.220	108,05%	1.250.565.000	3.718.205.623	2.467.640.623	297,32%
B	BELANJA NEGARA	B.2.								
B.1.1	Rupiah Murni		308.016.126.000	297.011.269.745	(11.004.856.255)	96,43%	241.525.168.000	238.074.180.645	(3.450.987.355)	98,57%
B.1.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	83.882.655.000	82.101.070.009	(1.781.584.991)	97,88%	73.747.966.000	72.293.287.798	(1.454.678.202)	98,03%
B.1.1.b	Belanja Barang	B.4.	176.680.054.000	172.414.907.674	(4.265.146.326)	97,59%	144.720.870.000	142.903.739.935	(1.817.130.065)	98,74%
B.1.1.c	Belanja Modal	B.5.	47.453.417.000	42.495.292.062	(4.958.124.938)	89,55%	23.056.332.000	22.877.152.912	(179.179.088)	99,22%
JUMLAH BELANJA (B.1)			308.016.126.000	297.011.269.745	(11.004.856.255)	96,43%	241.525.168.000	238.074.180.645	(3.450.987.355)	98,57%

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
 (DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt.	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0	0	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	10.018.732.969	7.982.651.289	2.036.081.680	25,51
Piutang Bukan Pajak	C.3	280.015.286	223.609.404	56.405.882	25,23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(1.400.079)	(81.498.800)	80.098.721	(98,28)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		278.615.207	142.110.604	136.504.603	96,06
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.000	3.500.000	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.482.500	3.482.500	0	0,00
Persediaan	C.7	1.918.693.216	1.827.996.263	90.696.953	4,96
JUMLAH ASET LANCAR		12.219.523.892	9.956.240.656	2.263.283.236	22,73
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.448.189.807.000	1.468.058.953.000	(19.869.146.000)	(1,35)
Peralatan dan Mesin	C.9	185.711.620.850	150.009.750.037	35.701.870.813	23,80
Gedung dan Bangunan	C.10	509.546.340.272	502.779.300.372	6.767.039.900	1,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	7.706.388.680	7.706.388.680	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	15.822.096	1.066.410.162	(1.050.588.066)	(98,52)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	0	1.040.842.000	(1.040.842.000)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan	C.14	(194.316.987.139)	(168.445.610.736)	(25.871.376.403)	15,36
JUMLAH ASET TETAP		1.956.852.991.759	1.962.216.033.515	(5.363.041.756)	(0,27)
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi	C.15	21.349.361.185	21.349.361.185	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.16	(4.000.513.596)	(3.466.702.900)	(533.810.696)	15,40
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		17.348.847.589	17.882.658.285	(533.810.696)	(2,99)
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	18.240.748	24.240.748	(6.000.000)	(24,75)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.18	(91.204)	(121.204)	30.000	(24,75)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		18.149.544	24.119.544	(5.970.000)	(24,75)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		18.149.544	24.119.544	(5.970.000)	(24,75)
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.19	15.930.603.312	16.128.603.312	(198.000.000)	(1,23)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	32.392.974.634	11.344.665.203	21.048.309.431	185,53
Aset Lain-lain	C.21	23.198.100.000	3.500.000	23.194.600.000	662702,86
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(15.811.118.780)	(15.428.310.992)	(382.807.788)	2,48
JUMLAH ASET LAINNYA		55.710.559.166	12.048.457.523	43.662.101.643	362,39
JUMLAH ASET		2.042.150.071.950	2.002.127.509.523	40.022.562.427	2,00
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	32.662.792.519	9.010.472.039	23.652.320.480	262,50
Pendapatan Diterima Dimuka	C.24	9.699.939.032	3.934.330.990	5.765.608.042	146,55
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		42.362.731.551	12.944.803.029	29.417.928.522	227,26
JUMLAH KEWAJIBAN		42.362.731.551	12.944.803.029	29.417.928.522	227,26
EKUITAS					
Ekuitas	C.25	1.999.787.340.399	1.989.182.706.494	10.604.633.905	0,53
JUMLAH EKUITAS		1.999.787.340.399	1.989.182.706.494	10.604.633.905	0,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.042.150.071.950	2.002.127.509.523	40.022.562.427	2,00

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
 (DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5.315.299.032	4.609.006.353	706.292.679	15,32
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		5.315.299.032	4.609.006.353	706.292.679	15,32
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		5.315.299.032	4.609.006.353	706.292.679	15,32
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	82.459.343.914	71.964.208.043	10.495.135.871	14,58
Beban Persediaan	D.3	1.929.781.441	1.889.316.946	40.464.495	2,14
Beban Barang dan Jasa	D.4	122.331.457.751	101.579.396.242	20.752.061.509	20,43
Beban Pemeliharaan	D.5	10.383.433.605	11.349.906.656	(966.473.051)	(8,52)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	32.686.929.891	28.908.978.993	3.777.950.898	13,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	30.545.105.814	31.889.387.641	(1.344.281.827)	(4,22)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(80.112.841)	207.877	(80.320.718)	(38.638,58)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		280.255.939.575	247.581.402.398	32.674.537.177	13,20
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(274.940.640.543)	(242.972.396.045)	(31.968.244.498)	13,16
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		495.987.393	43.500.000	452.487.393	1.040,20
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.266.737.666	61.988.064	1.204.749.602	1.943,52
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(770.750.273)	(18.488.064)	(752.262.209)	4.068,91
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.558.317.806	379.850.737	1.178.467.069	310,24
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		176.955.752	41.551.010	135.404.742	325,88
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.381.362.054	338.299.727	1.043.062.327	308,32
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	610.611.781	319.811.663	290.800.118	90,93
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(274.330.028.762)	(242.652.584.382)	(31.677.444.380)	13,05



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
 (DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	1.989.182.706.494	1.940.531.687.224	48.651.019.270	2,51
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(274.330.028.762)	(242.652.584.382)	(31.677.444.380)	13,05
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(328.335.858)	4.486.123.363	(4.814.459.221)	(107,32)
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0	0	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(325.175.738)	4.486.123.363	(4.811.299.101)	(107,25)
LAIN-LAIN		(3.160.120)	0	(3.160.120)	(100,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	285.262.998.525	286.817.480.289	(1.554.481.764)	(0,54)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		10.604.633.905	48.651.019.270	(38.046.385.365)	(78,20)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.999.787.340.399	1.989.182.706.494	10.604.633.905	0,53

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA****ERICK THOHIR**

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertransformasi dari unit eselon II di Kementerian Keuangan (1973-1993) menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (1993-1998) lalu menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998. Kementerian Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara telah ditetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Kementerian Negara. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi dan privatisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan, teknologi informasi, manajemen keuangan dan manajemen risiko, dan kepatuhan dan tata kelola program prioritas pemerintah, penyertaan modal negara, dan penugasan pemerintah pada badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi dan privatisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan, teknologi informasi, manajemen keuangan dan manajemen risiko, dan kepatuhan dan tata kelola program prioritas pemerintah, penyertaan modal negara, dan penugasan pemerintah pada badan usaha milik negara;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pada saat Laporan Keuangan ini diterbitkan, telah dilantik Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024, dengan Kementerian Badan

Usaha Milik Negara memiliki 3 (tiga) Wakil Menteri. Memperhatikan Peraturan Presiden tersebut di atas, maka Susunan Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) Wakil Menteri;
- b) Sekretaris Kementerian;
- c) Deputi Bidang Badan Usaha Milik Negara Penciptaan Nilai;
- d) Deputi Bidang Badan Usaha Milik Negara Pemberdayaan Pembangunan;
- e) Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- f) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi;
- g) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
- h) Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola;
- i) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Luar Negeri;
- j) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- k) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- l) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan Swasta.

Ketentuan peralihan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2024 tersebut mengatur bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Selain itu, saat ini masih disusun Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka Susunan Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara beserta Pejabatnya Per 31 Desember 2024 masih mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) Wakil Menteri dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo, Sdr. Dony Oskaria, dan Sdr. Aminuddin Ma'ruf;
- b) Sekretaris Kementerian dijabat oleh Sdr. Rabin Indrajad Hattari;
- c) Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sedang dalam proses pengisian;
- d) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Tedi Bharata;
- e) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko sedang dalam proses pengisian;
- f) Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;

- g) Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis oleh Sdr. Wahyu Setyawan;
- h) Staf Ahli Bidang Industri oleh Sdr. Andus Winarno.

Sebagaimana lini masa yang diatur pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, saat ini sedang disusun Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2025-2029. Sementara menunggu penetapan rencana strategis tersebut, saat ini masih mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Melalui Renstra Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2020-2024, diharapkan BUMN akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik

Negara dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengimplementasikan keseluruhan modul dalam aplikasi tersebut yang meliputi Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Melalui SAKTI, proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, telah terintegrasi dalam aplikasi tersebut.

Selain mengelola DIPA BA 041, Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Investasi Pemerintah) yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan- LRA

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- 2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b) Pendapatan- LO

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan

Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- 2) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

c) Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- 3) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Beban

- 1) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2) Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD).

3) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

4) Properti Investasi

- Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai properti investasi disajikan berdasarkan nilai tercatat dari biaya perolehan atas properti investasi yang dialihgunakan.
- Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang mengatur Aset Tetap.

5) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

6) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB) dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam 1 (satu) periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp308.016.126.000. Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan 6 (enam) kali revisi DIPA dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja serta optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja. Sehingga rincian DIPA hingga saat ini adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	83.488.305.000	83.882.655.000
Belanja Barang	185.080.643.000	176.680.054.000
Belanja Modal	39.447.178.000	47.453.417.000
Total Belanja	308.016.126.000	308.016.126.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka rincian DIPA adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen	211.283.102.000	207.618.369.000
Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	96.733.024.000	100.397.757.000
Total Belanja	308.016.126.000	308.016.126.000

Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengajukan 16 (enam belas) Rincian Output yang berkaitan dengan Prioritas Nasional namun tidak di-tagging dalam Rencana Kerja 2024 yaitu:

1. Rumusan Kebijakan di bidang BUMN dalam pengembangan EV Battery;
2. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka hilirisasi bahan tambang;
3. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan sektor hulu dan hilir migas;
4. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas;
5. Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro;
6. Rumusan Kebijakan dalam Pengembangan RS Internasional di KEK Kesehatan Sanur;
7. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur bandara IKN;
8. Rumusan Kebijakan di bidang BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN;
9. Rumusan Kebijakan bidang BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera;

10. Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan kawasan pelabuhan;
11. Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Bandara;
12. Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga Listrik;
13. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik;
14. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka *Unlock Value* PT Indonesia Asahan Alumunium;
15. Rumusan Kebijakan Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
16. Direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Group yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Capaian Riil dan Kegiatan atas Rincian Output tersebut di atas dapat dikoordinasikan langsung dengan Keasdepan Teknis Pembina BUMN.

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.830.339.220 atau mencapai 108,05% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.948.482.000. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.948.482.000	10.699.876.637	97,73%
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.621.057	100,00%
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	289.260.793	100,00%
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	328.593.340	100,00%
5	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	495.987.393	100,00%
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	6.000.000	100,00%
	Total	10.948.482.000	11.830.339.220	108,05%

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 secara total mengalami kenaikan sebesar 108,05% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.699.876.637	3.265.939.278	7.433.937.359	227,62%
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.621.057	171.661.348	(161.040.291)	(93,81%)
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	289.260.793	209.029.835	80.230.958	38,38%
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	328.593.340	17.575.162	311.018.178	1.769,65%
5	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	495.987.393	43.500.000	452.487.393	1040,21%
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	6.000.000	4.000.000	2.000.000	50,00%
7	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6.500.000	(6.500.000)	(100,00%)
Total		11.830.339.220	3.718.205.623	8.112.133.597	218,17%

Keterangan:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp10.699.876.637 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruangan, Listrik dan Air dari tenant Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Tenant	Pembayaran Ruangan	Pembayaran Listrik	Pembayaran Air	Total
Koperasi Prabunara	0	20.804.840	0	20.804.840
Koperasi Prabunara GS8	843.033.742	0	42.204.769	885.238.511
PT Bank Mandiri	39.220.000	7.023.675	0	46.243.675
PT BNI (Persero), Tbk	2.741.793.000	60.261.133	799.371	2.802.853.504
PT BRI (Persero), Tbk	5.687.726.000	53.158.991	967.848	5.741.852.839
PT BTN	58.830.000	6.216.273	0	65.046.273
PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	547.450.000	27.789.817	0	575.239.817
PT Djakarta Liyod	403.367.360	0	0	403.367.360
PT Nitraya Bimasakti	0	39.457.353	7.799.960	47.257.313
PT Telekomunikasi Seluler	0	24.892.770	0	24.892.770
PT Varuna Tirta Prakasya	87.079.735	0	0	87.079.735
Total	10.408.499.837	239.604.852	51.771.948	10.699.876.637

- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp10.621.057 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
- c. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp289.260.793 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.

- d. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp328.593.340 terdiri atas:
- 1) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Penggantian 1 Unit Genset atas nama PT Trimitra Mandiri Utama sebesar Rp216.066.400;
 - 2) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 atas nama PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
 - 3) Denda keterlambatan pekerjaan Renovasi Lantai 3 dan *Furniture* atas nama PT. Niscala Karya Konstruksi sebesar Rp16.303.256;
 - 4) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *Railing* dan Atap Kanopi *Outdoor Daycare* atas nama PT Heru Adi Konstruksi sebesar Rp4.143.508;
 - 5) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Jasa *Event Organizer* Upacara HUT RI ke 79 atas nama PT Prediksi Aman Sejahtera sebesar Rp2.469.900;
 - 6) Denda keterlambatan penyelesaian Pelatihan *Showcasing Leadership Skills* Kementerian BUMN Tahun 2024 atas nama PT. Transforma Sinergi Indonesia sebesar Rp1.831.500;
 - 7) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Bongkaran dan Dinding Ruang Tenang atas nama PT Pandu Ashoka Indonesia sebesar Rp1.601.865;
 - 8) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan MEP *Outdoor Daycare* atas nama PT Casa Prima Indonesia sebesar Rp1.448.376;
 - 9) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *Finishing* Lantai dan Pintu Ruang Tenang atas nama PT Parama Agung Karya sebesar Rp1.238.793;
 - 10) Denda keterlambatan penyelesaian Paket *Meeting* dalam rangka *Workshop* Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2024 atas nama PT Hotel Indonesia Natour sebesar Rp997.254;
 - 11) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Plafond Ruang Tenang atas nama PT Global Sentral Niaga sebesar Rp990.694;
 - 12) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Jasa Pengawas Renovasi Ruang Tenang atas nama PT Kanta Karya Utama sebesar Rp448.649;
 - 13) Denda keterlambatan penyelesaian Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Lantai 3 dan *Furniture* atas nama PT Kanta Karya Utama sebesar Rp268.468.
- e. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp495.987.393 merupakan Hasil Bersih Lelang atas:
- 1) Lelang Nomor RL-316/07.05/2024-01 tanggal 25 Juli 2024 sebesar Rp326.118.560 atas 1 paket BMN peralatan kantor dan buku-buku sebanyak total

2.987 unit kondisi rusak berat, persediaan usang, dan bongkaran dengan kondisi apa adanya;

- 2) Lelang Nomor RL-667/07.05/2024-01 tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp169.868.833 atas 1 Unit Elevator serta beberapa Unit Mobil dan Motor dalam kondisi rusak berat dan apa adanya.

- f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain senilai Rp6.000.000 merupakan penyetoran atas pembayaran tuntutan ganti kerugian negara oleh Sdr. DNZ.

2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp297.011.269.745 atau 96,43% dari anggaran belanja sebesar Rp308.016.126.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 tersaji sebagai berikut:

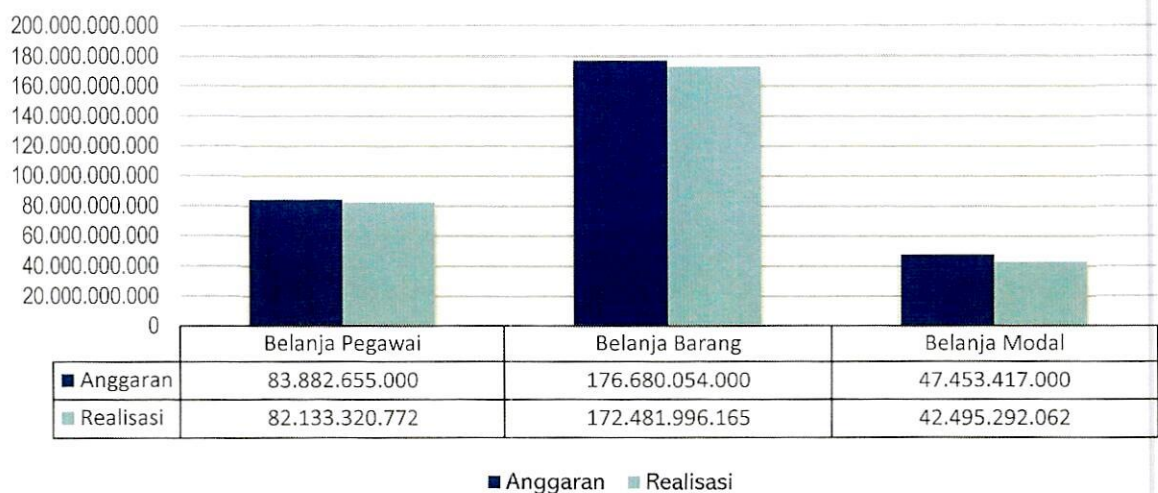
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	83.882.655.000	82.133.320.772	97,91%
2	Belanja Barang	176.680.054.000	172.481.996.165	97,62%
3	Belanja Modal	47.453.417.000	42.495.292.062	89,55%
	Total Belanja Kotor	308.016.126.000	297.110.608.999	96,46%
	Pengembalian Belanja	0	(99.339.254)	100,00%
	Total	308.016.126.000	297.011.269.745	96,43%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan Program Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian Program	31 Desember 2024		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen	207.618.369.000	199.626.007.830	96,15%
Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	100.397.757.000	97.385.261.915	97,00%
Total Belanja	308.016.126.000	297.011.269.745	96,43%

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp82.101.070.009 dan Rp72.293.287.798. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,57% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	33.225.175.411	30.916.757.963	2.308.417.448	7,47%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	789.573.472	968.640.504	(179.067.032)	(18,49%)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	246.375.856	0	246.375.856	100,00%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	463.985.390	420.877.082	43.108.308	10,24%
5	Belanja Lembur	79.691.000	0	79.691.000	100,00%
6	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	47.328.519.643	40.006.959.689	7.321.559.954	18,30%
	Jumlah Belanja Kotor	82.133.320.772	72.313.235.238	9.820.085.534	13,58%
	Pengembalian Belanja Pegawai	(32.250.763)	(19.947.440)	(12.303.323)	61,68%
	Total	82.101.070.009	72.293.287.798	9.807.782.211	13,57%

Adapun kenaikan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tersebut diantaranya berasal dari:

- 1) Peningkatan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito sebesar Rp7.321.559.954 atau 18,30% dari realisasi tahun lalu disebabkan adanya penambahan jumlah PPPK yaitu Pejabat Tinggi Madya yang sebelumnya 3 (tiga) orang menjadi 4 (empat) orang, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Kinerja-13 secara penuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
- 2) Peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.308.417.448 atau 7,47% dari realisasi tahun lalu disebabkan kenaikan tarif gaji PNS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sebesar Rp246.375.856 merupakan realokasi Belanja Pegawai Staf Khusus Menteri yang sebelumnya dialokasikan pada Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp172.414.907.674 dan Rp142.903.739.935. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,65% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
1	Belanja Barang Operasional	16.253.071.785	21.484.913.278	(5.231.841.493)	(24,35%)
2	Belanja Barang Non Operasional	13.907.361.231	15.293.154.504	(1.385.793.273)	(9,06%)
3	Belanja Barang Persediaan	2.313.233.955	2.388.391.184	(75.157.229)	(3,15%)
4	Belanja Jasa	92.025.318.971	63.550.680.656	28.474.638.315	44,81%
5	Belanja Pemeliharaan	15.255.303.565	11.355.318.840	3.899.984.725	34,35%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	30.516.559.426	27.670.405.648	2.846.153.778	10,29%
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.211.147.232	1.267.552.287	943.594.945	74,44%
8	Belanja Jasa – Penangan Pandemi Covid-19	0	480.000	(480.000)	(100,00%)
	Jumlah Belanja Kotor	172.481.996.165	143.010.896.397	29.471.099.768	20,61%
	Pengembalian Belanja Barang	(67.088.491)	(107.156.462)	40.067.971	(37,39%)
	Total	172.414.907.674	142.903.739.935	29.511.167.739	20,65%

Adapun kenaikan Belanja Barang tersebut di atas diantaranya berasal dari:

- 1) Peningkatan Belanja Jasa sebesar Rp28.474.638.315 atau lebih tinggi 44,81% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya kegiatan baru di Tahun Anggaran 2024 diantaranya:
 - Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Sistem Remunerasi Direksi dan Dekom/Dewas sebesar Rp4.123.854.552;
 - Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Standar Pemeriksaan Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp3.198.909.000;
 - Pengadaan Implementasi *Privilege Access Management* sebesar Rp2.408.000.000;

- Pengadaan Implementasi *Network Access Control* (NAC) sebesar Rp1.624.000.000;
- Pengadaan Implementasi *Endpoint Management* sebesar Rp1.158.840.000;

Selain itu, adanya peningkatan nilai kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 diantaranya:

- Pengadaan Sewa Kendaraan sebesar Rp6.201.520.000 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang hal Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Pengadaan Pengelolaan Gedung sebesar Rp4.857.797.450 disebabkan oleh naiknya UMP (Upah Minimum Provinsi) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 2) Peningkatan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.899.984.725 atau lebih tinggi 34,35% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, disebabkan oleh meningkatnya realisasi Belanja Pemeliharaan Lainnya berupa Pengadaan Implementasi *Cloud* untuk Aplikasi SiNadine sebesar Rp2.480.000.000;
- 3) Peningkatan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp2.846.153.778 atau lebih tinggi 10,29% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sejalan dengan meningkatnya pagu DIPA Kementerian BUMN di Tahun 2024 dari DIPA Tahun 2023 serta sesuai dengan rencana program kerja Kementerian BUMN.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp42.495.292.062 dan Rp22.877.152.912. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 85,75% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.360.369.462	13.387.724.246	18.972.645.216	141,72%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.134.922.600	9.489.428.666	645.493.934	6,80%
	Jumlah Belanja Kotor	42.495.292.062	22.877.152.912	19.618.139.150	85,75%
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	100,00%
	Total	42.495.292.062	22.877.152.912	19.618.139.150	85,75%

Adapun kenaikan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 tersebut sejalan dengan kebutuhan barang milik negara untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.360.369.462 diantaranya merupakan realisasi:
 - Pengadaan Peremajaan *Server* sebesar Rp8.626.311.720;
 - Pengadaan Peningkatan Keamanan Jaringan *Firewall* sebesar Rp6.958.580.000;
 - Pengadaan dan Penggantian 1 (satu) Unit Genset sebesar Rp4.767.000.000;
 - Pengadaan Implementasi *Backup* dan *Storage* sebesar Rp2.106.897.000;
 - Pengadaan Perangkat Audio dan Visual *Ballroom* Lantai 17 sebesar Rp2.029.801.500.
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.134.922.600 berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan diantaranya merupakan realisasi:
 - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 17 dan Lantai 19 sebesar Rp3.739.109.127;
 - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 3 dan *Furniture* Rp3.558.856.974;
 - Pengadaan Pekerjaan *Daycare* sebesar Rp837.060.380;
 - Pengadaan Pekerjaan Ruang Tenang sebesar Rp743.319.700;
 - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Wartawan sebesar Rp256.454.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Persediaan

No.	Bulan	Mutasi			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	293.921.164	168.458.647	125.462.517
3	Maret	125.462.517	617.788.576	477.253.408	265.997.685
4	April	265.997.685	427.576.022	540.388.815	153.184.892
5	Mei	153.184.892	565.419.621	506.257.514	212.346.999
6	Juni	212.346.999	724.416.317	709.473.316	227.290.000
7	Juli	227.290.000	697.669.928	674.959.928	250.000.000
8	Agustus	250.000.000	593.101.930	792.854.656	50.247.274
9	September	50.247.274	902.755.042	762.213.731	190.788.585
10	Oktober	190.788.585	757.414.652	651.973.084	296.230.153
11	November	296.230.153	550.067.456	590.724.509	255.573.100
12	Desember	255.573.100	427.249.516	682.822.616	0

Pada bulan Februari 2024, telah dicairkan UP sebesar Rp293.921.164, dan sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penggantian UP sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, pada tanggal 20 Desember 2024 telah disetorkan sisa UP ke Kas Negara sebesar Rp107.858.

b. Tambahan Uang Persediaan

Pada bulan Desember 2024, telah dicairkan TUP sebesar Rp6.716.536.820, dan sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penggantian TUP sehingga pada akhir tahun 2024 sebesar Rp0. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2024 telah disetorkan sisa TUP ke Kas Negara sebesar Rp1.165.459.391.

2. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.018.732.969 dan Rp7.982.651.289 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka			
No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pembayaran Voucher BBM	33.050.000	212.700.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i> dan <i>Antivirus</i>	8.653.190.469	4.037.920.964
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	830.159.167	820.930.325
4	Pembayaran Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN	502.333.333	284.500.000
5	Pembayaran Dimuka atas 1 unit Genset	0	2.626.600.000
Jumlah		10.018.732.969	7.982.651.289

3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp280.015.286 dan Rp223.609.404. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp280.015.286 terdiri atas:

- Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp216.909.023;
- Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa *housekeeping*, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902;
- Pengembalian kelebihan Gaji Induk atas pemberhentian PNS untuk 2 pegawai sebesar Rp10.455.300;
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 3 orang pegawai a.n. AS dkk. sebesar Rp4.067.200;
- Pengembalian kelebihan pembayaran PPNPN atas potongan absensi bulan Desember 2024 untuk 12 pegawai sebesar Rp3.784.941;
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 3 orang pegawai a.n. HR dkk. sebesar Rp2.112.120;
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin a.n. Sy sebesar Rp658.200;
- Kelebihan pembayaran Gaji Induk atas pemberhentian dari jabatan struktural untuk 1 orang pegawai a.n. RFR sebesar Rp349.600;

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 bertambah sebesar Rp56.405.882 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023		223.609.404
Penambahan		362.834.427
- Piutang PNBPN atas sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2024	216.909.023	
- Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan operasional	131.335.563	
- Kelebihan pembayaran gaji induk atas pemberhentian PNS untuk 2 pegawai	10.455.300	
- Kelebihan pembayaran PPNPN atas potongan absensi bulan Desember 2024 untuk 12 pegawai	3.784.941	
- Kelebihan pembayaran gaji induk atas pemberhentian dari jabatan struktural a.n. RFR	349.600	
Pengurangan		306.428.545
- Pelunasan kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan operasional	131.335.563	
- Pelunasan piutang PNBPN atas sewa tanah, gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	83.687.249	
- Pelunasan kelebihan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawas renovasi ruang kerja	80.784.677	
- Pelunasan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai	5.971.438	
- Pelunasan kelebihan pembayaran gaji induk atas pengenaan hukuman disiplin untuk 1 orang pegawai	2.641.900	
- Pelunasan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai	783.190	
- Pelunasan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 4 orang pegawai	684.528	
- Pelunasan kelebihan pembayaran gaji induk atas pemberhentian dari jabatan struktural a.n. R.Y.	540.000	
Jumlah Pengurangan		56.405.882
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024		56.405.882
Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024		280.015.286

Penjelasan secara detail atas mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Besaran sewa ruangan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan. Apabila sewa terjadi sebelum adanya penetapan dari Pengelola Barang, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dapat menetapkan nilai besaran sewa berdasarkan hasil reviu dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu Inspektorat. Selanjutnya terhadap besaran sewa yang ditetapkan di atas melebihi dari nilai penetapan dari Pengelola Barang, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian sewa dalam hal sudah dilakukan pembayaran atau penyetoran ke kas negara. Selain pembayaran atas sewa ruangan, *tenant* juga diwajibkan membayar beban listrik dan air yang melekat pada sewa ruangan. Oleh karena itu, piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang Sewa 31 Desember 2024			
		Ruangan	Listrik	Air	Total
1	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	127.402.190	0	0	127.402.190
2	PT Djakarta Lloyd (Persero)	62.809.136	0	0	62.809.136
3	Koperasi Prabunara	0	1.532.976	4.731.941	6.264.917
4	PT BNI (Persero), Tbk	0	4.784.918	54.099	4.839.017
5	PT BRI (Persero), Tbk	0	4.430.335	81.114	4.511.449
6	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	4.334.482	0	4.334.482
7	PT Nitraya Bimasakti	0	2.384.005	736.010	3.120.015
8	PT Telekomunikasi Seluler	0	2.591.783	0	2.591.783
9	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	0	518.017	0	518.017
10	PT BTN (Persero), Tbk	0	518.017	0	518.017
Jumlah		190.211.326	21.094.533	5.603.164	216.909.023

- b. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa *housekeeping* pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902 merupakan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018. Atas temuan tersebut, telah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan PT Provinces Indonesia, dengan melibatkan *Account Representatif* (AR) KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang pada intinya disepakati bahwa PT Provinces Indonesia akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018 sebagai syarat administrasi pengembalian kelebihan pembayaran PPN. Selanjutnya, PT Provinces Indonesia telah berupaya untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018, namun terkendala adanya perubahan NPWP Bendahara Pengeluaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Atas hal tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan AR KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, dan melalui Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-482/KPP.0601/2022 tanggal 12 Juli 2022 menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara agar mengajukan Permohonan Aktivasi NPWP Sementara, dan Bendahara Pengeluaran telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat nomor S-15/BP.MBU/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan faktur oleh PT Provinces Indonesia;
- 2) PT Provinces Indonesia disarankan membuat Faktur Pajak Tahun 2021 dengan menggunakan NPWP Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang baru, namun

hal ini berdampak pada dikenakan denda keterlambatan atas kewajiban pelaporan pajak;

- 3) Atas pengenaan denda tersebut PT Provinces Indonesia disarankan untuk berkonsultasi ke KPP dimana PT Provinces Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak.

Di sisi lain, PT Provinces Indonesia telah memenuhi kewajiban dengan mengembalikan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar Rp65.808.792, sedangkan unsur pengembalian kelebihan PPN sebesar Rp41.678.902 secara teknis cukup sulit untuk ditindaklanjuti oleh PT Provinces Indonesia dan menimbulkan beban denda yang menjadi tanggungan PT Provinces Indonesia dari ketentuan pelaporan pajak yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-265/MBU/S/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang pada intinya agar status rekomendasi atas temuan tersebut menjadi Selesai dan Sebagian Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD). Selanjutnya apabila temuan tersebut sudah dinyatakan selesai oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran akan mengeluarkan transaksi tersebut dari saldo piutang bukan pajak.

PT Provinces Indonesia melalui surat Nomor 099.01/PVI/DIR-MA/II-2023 tanggal 1 Februari 2023 menyampaikan pula secara tertulis mengenai upaya penyelesaian yang telah dilakukan serta keberatan apabila dikenakan denda keterlambatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan III Tahun 2023 bersama dengan Tim Pemantau Tindak Lanjut BPK RI yang pada intinya secara substansi atas temuan pemeriksaan yang berkenaan dengan PT Provinces Indonesia dapat diusulkan sesuai atau selesai ditindaklanjuti. Namun, penyesuaian status piutang tersebut akan dilakukan setelah penerbitan Surat Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI.

- c. Atas piutang yang timbul dari kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677, telah dilakukan setoran awal ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp13.366.337, setoran kedua pada tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp19.093.740, setoran ketiga pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp47.524.752, serta pelunasan akhir pada tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp799.848.

Sehubungan dengan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2024 atas kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 3 dan Furniture, PT Niscala Karya Konstruksi melalui Surat Nomor:

56.SKPP.NKK.BUMN.04.2025 tanggal 30 April 2025 menyampaikan kesanggupan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran senilai Rp168.584.617 selambat-lambatnya 31 Desember 2025.

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(1.400.079) dan Rp(81.498.800) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

No.	Debitur	Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
1	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	127.402.190	0,50%	637.011	Lancar
2	PT Djakarta Lloyd (Persero)	62.809.136	0,50%	314.046	Lancar
3	PT Provinces Indonesia	41.678.902	0,50%	208.395	Lancar
4	Koperasi Prabunara	6.264.917	0,50%	31.325	Lancar
5	PT BNI (Persero), Tbk	4.839.017	0,50%	24.195	Lancar
6	PT BRI (Persero), Tbk	4.511.449	0,50%	22.558	Lancar
7	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	4.334.482	0,50%	21.673	Lancar
8	PT Nitraya Bimasakti	3.120.015	0,50%	15.600	Lancar
9	PT Telekomunikasi Seluler	2.591.783	0,50%	12.959	Lancar
10	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	518.017	0,50%	2.590	Lancar
11	PT BTN (Persero), Tbk	518.017	0,50%	2.590	Lancar
12	Pegawai Kementerian BUMN	21.427.361	0,50%	107.137	Lancar
Jumlah		280.015.286		1.400.079	

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.500.000 dan Rp3.500.000. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi ke dalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantiannya sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(17.500) dan Rp(17.500) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.000	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/ diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.918.693.216 dan Rp1.827.996.263. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	1.706.911.771	1.664.518.691
2	Bahan untuk Pemeliharaan	106.706.240	108.671.580
3	Suku Cadang	56.384.997	26.121.367
4	Persediaan Lainnya	48.690.208	28.684.625
Jumlah		1.918.693.216	1.827.996.263

Terdapat persediaan yang dicatat sebagai persediaan usang sebesar Rp41.551.010 yang masih dalam proses penjualan, terdiri atas:

- 1.680 Art Cartoon 260 A4 sebesar Rp2.187.360;
- 900 Art Cartoon 260 F4 sebesar Rp566.100;
- 84 buah Map Kancing sebesar Rp411.180;
- 78 buah Bantalan Stempel sebesar Rp656.370;
- 16 buah Toner LaserJet sebesar Rp35.024.000;
- 41 buah Keyboard Classic sebesar Rp2.706.000.

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian Badan Usaha Milik Negara seluruhnya seluas 17.776 M². Pada tanggal 11 Agustus 2015, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat

Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Nilai Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.448.189.807.000 dan Rp1.468.058.953.000. Nilai Tanah per 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp19.869.146.000 dibandingkan dengan Nilai Tanah per 31 Desember 2023. Nilai pengurangan sebesar Rp19.869.146.000 direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain dikarenakan Aset tersebut sedang dalam proses pemindahtanganan melalui PMPP. Aset dimaksud merupakan Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara (eks. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)) yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penetapan status penggunaan tersebut ditindaklanjuti dengan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Adapun nilai Aset tersebut sebesar Rp19.869.146.000 merupakan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.

Proses PMPP Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Sesuai hasil klarifikasi dan verifikasi data Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh Direktorat Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Oktober 2020 maka sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor BA-VER-0411X/2020 terdapat jumlah tanah sebanyak 5 (lima) bidang yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak pakai dan 4 (empat) bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan tersebut telah atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan telah berakhir hak guna bangunannya pada tanggal 2 Maret 2012. Informasi yang diterima bahwa perpanjangan hak guna bangunan tersebut akan dilakukan oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) setelah aset tersebut ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Pada tanggal 14 Januari 2021, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) telah mengajukan permohonan PMN Non Tunai kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: A.044/PL.303/A.I atas Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, permohonan tersebut diusulkan sebagai PMN Triwulan III Tahun Anggaran 2024 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-132/MBU/02/2021 tanggal 24 Februari 2021. Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kementerian

Badan Usaha Milik Negara dengan Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-158/MK.6/2022 tanggal 22 April 2022.

Menteri Keuangan telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya melalui Surat Nomor S-1114/MK.06/2022 tanggal 29 Desember 2022, namun pada akhirnya Peraturan Pemerintah atas PMPP tersebut gagal terbit pada Tahun 2023. Sejak bulan November 2022, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui mekanisme pemanfaatan sewa BMN telah menggunakan sebagian dari ruangan Gedung untuk kegiatan kantor pusat dan sebagian disewakan juga kepada *tenant* lain yaitu PT Djakarta Lloyd.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara telah bersurat kepada Menteri Keuangan tembusan kepada Menteri BUMN Nomor: B-402/M/D-1/HK.02.02/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya, yang pada pokoknya menyampaikan:

- a) Alokasi dalam UU APBN hanya berlaku satu tahun namun UU APBN berlaku melebihi masa satu tahun;
- b) Sumber PMN berupa Barang Milik Negara (BMN) kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) juga berupa alokasi pada UU APBN Tahun 2022 maka selaras dengan ketentuan penetapan PP PMN yang bersumber dari alokasi dana tunai (*fresh money*), penetapan PP PMN yang bersumber dari alokasi BMN pada UU APBN Tahun 2022 juga harus ditetapkan pada tahun 2022 (tidak dapat melewati batas waktu tahun anggaran berjalan) sehingga alokasi PMN dimaksud dapat dikeluarkan/dipisahkan dari APBN Tahun 2022 pada tahun 2022.

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara a.n. Menteri BUMN telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-275/MBU/S/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal Koordinasi Kelanjutan Proses Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya. Atas surat tersebut, Menteri Keuangan telah menanggapi dengan Surat Nomor: S-634/MK.6/2023 tanggal 3 September 2023 hal Koordinasi Kelanjutan Proses Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), yang pada intinya Penyertaan Modal Negara tersebut sudah diusulkan untuk dicantumkan kembali

ke dalam Pasal 35 ayat (4) huruf f RUU APBN TA 2024, dan akan diproses lebih lanjut setelah penetapan UU APBN TA 2024. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah dicantumkan bahwa Pemerintah akan melakukan penambahan PMN kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang berasal dari BMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 21 Maret 2024, dilakukan Rapat Panitia Antar Kementerian PMPP pada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PT Perusahaan Pengelola Aset, dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero). Hasil dari rapat tersebut disepakati bahwa tanah yang dimaksud perlu diupayakan maksimal untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan 4 (empat) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- a. NIB. 09.05.000008376.0 berdasarkan Keputusan Nomor 436/HP/BPN-09.05/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi);
- b. NIB. 09.05.000008377.0 berdasarkan Keputusan Nomor 435/HP/BPN-09.05/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 113 M2 (seratus tiga belas meter persegi);
- c. NIB. 09.05.000008378.0 berdasarkan Keputusan Nomor 437/HP/BPN-09.05/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi);
- d. NIB. 09.05.000008379.0 berdasarkan Keputusan Nomor 438/HP/BPN-09.05/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi).

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp185.711.620.850 dan Rp150.009.750.037 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	31 December 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	17.266.769.317	20.185.098.171	(2.918.328.854)	(14,46)
2	Alat Angkutan	6.471.057.700	7.923.091.700	(1.452.034.000)	(18,33)
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.915.337.037	2.911.762.837	3.574.200	0,12
4	Alat Pengolahan	11.644.050	11.644.050	0	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	56.644.247.528	50.837.925.936	5.806.321.592	11,42
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21.002.462.564	5.647.918.039	15.354.544.525	271,86
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	220.362.432	220.362.432	0	0,00
8	Alat Laboratorium	6.185.789.152	6.104.331.152	81.458.000	1,33
9	Alat Persenjataan	29.920.000	29.920.000	0	0,00
10	Komputer	74.362.951.541	55.649.392.191	18.713.559.350	33,63
11	Alat Keselamatan Kerja	199.796.453	199.796.453	0	0,00
12	Peralatan Proses/Produksi	1.332.000	1.332.000	0	0,00
13	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	75.042.000	75.042.000	0	0,00
14	Peralatan Olahraga	324.909.076	212.133.076	112.776.000	53,16
Nilai Peralatan dan Mesin		185.711.620.850	150.009.750.037	35.701.870.813	23,80
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(132.437.479.404)	(115.794.005.309)	(16.643.474.095)	14,37
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		53.274.141.446	34.215.744.728	19.058.396.718	55,70

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2023		150.009.750.037
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.118.161.962	
- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	242.207.500	
- Reklasifikasi dari KDP berupa Genset Tahun 2023	5.833.671.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	160.199.700	
- Reklasifikasi dari Belanja Jasa Lainnya	854.000.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.482.500	
- Transfer Masuk dari Barekraf	2.360.831.030	
- Koreksi Pencatatan Nilai	1.191.075.066	
Jumlah Mutasi Tambah		<u>42.777.628.758</u>
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena dihentikan penggunaannya	(5.837.873.957)	
- Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	(2.758.350)	
- Koreksi Pencatatan Nilai	(1.235.125.638)	
Jumlah Mutasi Kurang		<u>(7.075.757.945)</u>
Jumlah Mutasi		<u>35.701.870.813</u>
Saldo Akhir 31/12/2024		185.711.620.850
Akumulasi Penyusutan		<u>(132.437.479.404)</u>
Nilai Buku per 31/12/2024		53.274.141.446

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp509.546.340.272 dan Rp502.779.300.372 dengan rincian kenaikan/penurunan sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2023		502.779.300.372
Mutasi Tambah		
- Belanja Penambahan Gedung dan Bangunan	10.134.922.600	
- - Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	117.771.000	
Jumlah Mutasi Tambah		10.252.693.600
Mutasi Kurang		
- BMN dalam proses PMPP	(3.325.454.000)	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	(160.199.700)	
Jumlah Mutasi Kurang		(3.485.653.700)
Jumlah Mutasi		6.767.039.900
Saldo Akhir 31/12/2024		509.546.340.272
Akumulasi Penyusutan		(59.611.399.403)
Nilai Buku per 31/12/2024		449.934.940.869

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.706.388.680 dan Rp7.706.388.680. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.822.096 dan Rp1.066.410.162. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp1.050.588.066 dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dikarenakan adanya usulan penghapusan atas buku perpustakaan dan VCD sebesar Rp1.050.588.066 melalui Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-125/KPB.MBU/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Hal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp15.822.096 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.040.842.000. Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 menjelaskan bahwa seluruh Konstruksi Dalam Pengerjaan telah diklasifikasikan ke dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

Saldo Awal 31/12/2023		1.040.842.000
Mutasi Tambah		
- Pengembangan dari KDP menyesuaikan dengan progress penyelesaian genset	2.626.000.000	
Jumlah Mutasi Tambah		2.626.000.000
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan	(117.771.000)	
- Reklasifikasi menjadi Peralatan dan Mesin	(3.549.071.000)	
Jumlah Mutasi Kurang		(3.666.842.000)
Jumlah Mutasi		(1.040.842.000)
Saldo Akhir 31/12/2024		0

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(194.316.987.139) dan Rp(168.445.610.736). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	185.711.620.850	132.437.479.404	53.274.141.446
2	Gedung dan Bangunan	509.546.340.272	59.611.399.403	449.934.940.869
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	2.268.108.332	5.438.280.348
4	Aset Tetap Lainnya	15.822.096	-	15.822.096
	Jumlah	702.980.171.898	194.316.987.139	508.663.184.759

15. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp21.349.361.185 dan Rp21.349.361.185. Berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: KET-2/KPB.MBU/12/2023, terdapat pemutakhiran pencatatan dan pengakuan BMN berupa reklasifikasi Gedung Sinergi 8 (Gedung Kantor Permanen NUP 2) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Properti Investasi. Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

16. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(4.000.513.596) dan Rp(3.466.702.900). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Properti Investasi.

17. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667 per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut di atas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp18.240.748 dan Rp24.240.748. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp6.000.000 dibandingkan dengan Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dikarenakan adanya setoran dari Sdr. DNZ sesuai dengan NTPN 3FA9448VVFF4VDKH tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/ Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	18.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
0,5% x 18.240.748	(91.204)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	18.149.544

18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(91.204) dan Rp(121.204) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	18.240.748	0,50%	91.204

19. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.930.603.312 dan Rp16.128.603.312. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 terdiri atas Lisensi sebesar Rp2.815.169.280 dan *Software* sebesar Rp13.115.434.032. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp198.000.000 dibandingkan per 31 Desember 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat Aset Tak Berwujud yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp198.000.000 yaitu:

1. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat. Aplikasi tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan SOP, Kendali Mutu Pengawasan dan Standar Audit yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000 merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat. Aplikasi tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan proses bisnis dan pengampu pengelolaan manajemen risiko pada Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-272/MBU/10/2023.

Adapun rincian atas Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a) Lisensi

Lisensi sebesar Rp2.815.169.280 terdiri atas:

Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak *virtual machine* untuk menciptakan dan menyimulasikan *server* secara virtual. VMware

berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.

b) Software

Software sebesar Rp13.115.434.032 terdiri atas:

- 1) Sistem Informasi Manajemen ASN (*simanis*) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama *Office Automation* (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian Badan Usaha Milik Negara seperti modul Pengelolaan Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, *Monitoring* Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.
- 2) Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <http://pkbl.bumn.go.id> senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan telah digunakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI terkait perubahan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan PKBL. Pada Tahun 2022 dan 2023 Portal PKBL berubah menjadi Portal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL (<http://tjsl.bumn.go.id>) dimana secara pengelolaan data berubah dari Portal PKBL sesuai informasi dan permintaan dari Keasdepan TJSL sebagai pengelola TJSL BUMN. Portal TJSL digunakan sebagai media pelaporan dan monitoring atas laporan Rencana Kerja Anggaran sesuai Pilar Pembangunan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Program, serta Realisasi Kegiatan.
- 3) Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp1.427.335.424, dan pada tahun 2019 berubah nama menjadi Portal HC (*Human Capital*) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (<https://hc.bumn.go.id>) yang digunakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk pengelolaan data Direksi dan Dewan Komisaris BUMN berupa masa jabatan, administrasi data

SK, *talent pool* kandidat Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan fitur *Executive Candidate* yang meliputi penambahan *Dashboard Executive*, proses pengelolaan data dari suksesi s.d. penetapan SK dan informasi Jabatan *expired*, Komposisi BOD/BOC, *Talent Management* yang memuat alur pengelolaan *talent* dan penyesuaian input data hasil *assessment*, *Job Profile* yang memuat kriteria dari setiap BUMN, kebutuhan *Analytic HC* untuk BOD, integrasi master data, data remunerasi BOD/BOC, data kursi BOD dan BOC, penyesuaian fitur input data dan *download CV*, penyesuaian *UI/UX* dari seluruh fitur di Portal HC.

- 4) Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama *Executive Information System* (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal *Financial Information System* (FIS) pada tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2018 berubah nama menjadi SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala), pada tahun 2023 Portal SiLaba diintegrasikan ke platform Aplikasi Pelayanan Publik (BUMN) dengan nama SATU (Sistem Informasi Terpadu) BUMN (<https://satu.bumn.go.id>). Portal SiLaba berfungsi sebagai media pelaporan dari seluruh BUMN terdiri dari Laporan Audited, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
- 5) *Windows Server 2012 R2 Data Center Edition* dan *User Cal* senilai Rp518.110.612 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 6) *Exchange Server 2013 Standard* dan *Enterprise* senilai Rp142.047.560 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 7) *Exchange Standard CAL 2013 OLP NL USERCAL* dan *woSrvcs* senilai Rp229.117.200 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 8) *WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UsrCAL* senilai Rp124.995.000 merupakan *software* yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 9) *Software Office 2019* senilai Rp114.360.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- 10) Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah *upgrade* sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- 11) *Microsoft SharePoint* senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform SharePoint* yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari *Microsoft SharePoint Server* dan CAL yang merupakan *Software* untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
- 12) Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
- 13) *Software Office* senilai Rp744.150.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menyelesaikan tugas.
- 14) *Navicat PostgreSQL*, Nitro PDF 12, *Sectigo SSL DV Certificate*, *Sketch* senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diadakan pada tahun 2019.

20. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, Menteri Keuangan membuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.392.974.634 dan Rp11.344.665.203. Adapun Dana Di Rekening Penampungan Kementerian BUMN per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.392.974.634, yang diajukan untuk penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai RPATA
1	KASTARA RUKMA ABADI	SP-20/PPK5.MBU/11/2024	Pengadaan Peremajaan Server	8.626.311.720
2	KASTARA RUKMA ABADI	SP-23/PPK5.MBU/12/2024	Pengadaan Implementasi Backup dan Storage	2.106.897.000

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai RPATA
3	DIFO LESTARI	SP-07/PPK5.MBU/05/2024	Pengadaan Helpdesk Layanan Teknologi Informasi	50.985.000
4	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-10/PPK5.MBU/06/2024	Pengadaan Layanan Dukungan Administrasi Keasdepan Bidang Jasa Keuangan Tahun 2024	7.926.596
5	KURASI MEDIA NUSANTARA	SPK-1/PPK1.MBU/01/2024	Pengadaan Analisis Media Sosial Monitoring Tahun 2024	16.499.040
6	CIPTA VISUAL INTEGRASI	SP-29/PPK5.MBU/12/2024	Pengadaan Perangkat Audio dan Visual Ballroom Lantai 17	2.029.801.500
7	PT ARUNA VEDA KREASI	SPK-3/PPK1.MBU/01/2024	Pengadaan Jasa Penerjemahan Konten Publikasi Kementerian BUMN	29.600.000
8	RADIUS ALLKINDO ELECTRIC	SP-25/PPK3.MBU/2024	Pengadaan UPS Lantai 19, 20 dan 21	416.500.000
9	DWIDA JAYA TAMA	SP-25/PPK5.MBU/12/2024	Pengadaan Furniture Renovasi Lantai 17 dan 19	812.659.357
10	ANEKA JAYA LANGGENG SENTOSA	SP-17/PPK3.MBU/2024	Pengadaan dan Penggantian 1 (satu) Unit Genset	3.813.600.000
11	INDONESIA COMNETS PLUS	SP-16/PPK5.MBU/12/2023	Langganan Layanan Internet Backup	47.750.000
12	HYUNDAI SOLUSI MOBILITAS	SP-12/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Listrik Eselon I dan II Periode Juli - Oktober 2024	832.800.000
13	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-11/PPK5.MBU/06/2024	Pengadaan Layanan Dukungan Administrasi Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Tahun 2024	7.926.596
14	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-03/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi	124.640.000
15	PT KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	PERJ-01/PPK2.MBU/2024	Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Pengelolaan Klinik Pratama Kementerian BUMN Tahun 2024	54.166.668
16	SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA	SP-19/PPK5.MBU/12/2023	Managed Operation And Development Application	400.944.650
17	AIRKON PRATAMA	Perj-04/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Jasa Pengelola Gedung	4.010.641.327
18	DWI MITRA SOLUSINDO	SP-5/PPK.1.MBU/12/2024	Pengadaan Belanja Modal Alat Editing Humas Kementerian BUMN	184.815.000
19	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-3/PPK1.MBU/06/2024	Pengadaan Jasa Layanan Dukungan Pimpinan Asisten Deputi Industri Pangan dan Pupuk Tahun 2024	7.926.602
20	SINERGI TRANSFORMASI DIGITAL	SP-27/PPK5.MBU/12/2024	Implementasi Cloud Untuk Aplikasi Magenta	497.622.946
21	PT NET SISTEM INFOTAMA	SP-28/PPK5.MBU/12/2024	Pembelian Warranty Smartnet WLC (Wireless LAN Controller)	93.200.000
22	DUTA TRANSFORMASI INSANI	SPK-36/PPK2.MBU/2024	Workshop Upskilling Employer Branding Aparatur Sipil Negara Tingkat Unit Kerja di Kementerian BUMN Tahun 2024	196.501.857
23	ALIEN BANGUN NUSANTARA	SP-24/PPK5.MBU/12/2024	Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 17 dan Lantai 19	2.991.287.302
24	ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS	SPK-18/PPK4.MBU/12/2024	Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Aspek Legal Pengalihan BUMN	99.900.000
25	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-09/PPK5.MBU/05/2024	Pengadaan Layanan Dukungan Administrasi Kedeputan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Tahun 2024	7.926.596
26	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-08/PPK5.MBU/05/2024	Pengadaan Layanan Dukungan Administrasi Keasdepan Bidang Jasa Logistik Tahun 2024	7.926.596
27	MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK	SP-18/PPK5.MBU/12/2023	Pengadaan Langganan Aplikasi Dokumen Manajemen	298.700.000
28	KASTARA RUKMA ABADI	SP-20/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Perangkat Jaringan IT	537.989.250
29	MITRA INTEGRASI INFORMATIKA	SPK-37/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Jasa Instalasi Jaringan Internet serta Jaringan Fiber Optic	172.050.000

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai RPATA
30	PT GRIYASIS CIPTA GLOBALINDO	SP-21/PPK5.MBU/11/2024	Pengadaan Perpanjangan Garansi Perangkat Server dan Perangkat Storage	457.500.000
31	MEGA ALFA SOLUSI	SP-4/PPK.1.MBU/12/2024	Pengadaan Belanja Modal Alat Peliputan Humas Kementerian BUMN	71.484.000
32	INDONESIA COMNETS PLUS	SP-18/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Manage Service Perangkat CCTV dan Visitor Management System Gedung Kementerian BUMN	135.000.000
33	SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA	SPK-13/PPK5.MBU/2024	Pengadaan Local Support Sistem PAM (Privileged Access Management)	47.175.000
34	KABAYAN CONSULTING	SPK-2/PPK1.MBU/01/2024.	Pengadaan Jasa Analisis Pemberitaan Media Monitoring 2024	16.499.999
35	FIRMUSINDO INFOTAMA	SP-17/PPK5.MBU/12/2023	Pengadaan Sewa Storage	241.536.000
36	INDONESIA COMNETS PLUS	SP-19/PPK5.MBU/11/2024	Implementasi Cloud untuk Aplikasi SINADINE	2.480.000.000
37	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	SP-15/PPK5.MBU/12/2023	Langganan Layanan Internet (Primer) dan Colocation	406.630.950
38	PT PERMATA GRAHA NUSANTARA	SP-2/PPK1.MBU/06/2024	Pengadaan Jasa Layanan Dukungan Pimpinan Pada Asisten Deputi Bidang Kesehatan Tahun 2024	7.926.602
39	NOERCHADIAH ALZAHIR	SP-07/PPK3.MBU/2024	Pengadaan Jasa Pengelolaan Daycare	43.726.480
Total				32.392.974.634

21. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.198.100.000 dan Rp3.500.000. Rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2023		3.500.000
Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi dari Tanah berupa BMN dalam proses PMPP	19.869.146.000	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa BMN dalam proses PMPP	3.325.454.000	
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Aset yang dihentikan penggunaannya	5.837.873.987	
Jumlah Mutasi Tambah		29.032.473.987
Mutasi Kurang		
- Pengusulan penghapusan atas Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya	5.837.873.987	
Jumlah Mutasi Kurang		5.837.873.987
Saldo Akhir 31/12/2024		23.198.100.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(302.790.860)
Nilai Buku per 31/12/2024		22.895.309.140

Terdapat penambahan pada pos Aset Lain-Lain sejumlah Rp23.194.600.000 merupakan reklasifikasi nilai Tanah dan Gedung Bangunan ke dalam Aset Lain-lain dikarenakan Aset tersebut sedang dalam proses pemindahtanganan melalui PMPP.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(15.811.118.780) dan Rp(15.428.310.992). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Aset 31 Desember 2024	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2024	Nilai Buku 31 Desember 2024
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	13.115.434.032	13.115.434.032	0
2	Lisensi	2.815.169.280	2.392.893.888	422.275.392
	Jumlah	15.930.603.312	15.508.327.920	422.275.392
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.500.000	3.500.000	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0
3	BMN Dalam Proses PMPP	23.194.600.000	299.290.860	22.895.309.140
	Jumlah	23.198.100.000	302.790.860	22.895.309.140
	Total	39.128.703.312	15.811.118.780	23.317.584.532

23. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.662.792.519 dan Rp9.010.472.039. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 terdiri atas:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp406.843.495 merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Belanja Pegawai yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024;
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp32.255.949.024 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga melalui Mekanisme RPATA yang BASTnya belum diterbitkan SPP Pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.652.320.480 dibandingkan per 31 Desember 2023 karena terdapat mutasi saldo utang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Utang Per 31 Des 2023	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Des 2024	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk 4 pegawai a.n. Syahrudin dkk	13.232.171	0	0	13.232.171	
2	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat bulan April tahun 2023 a.n. Afief Akmal dkk/31 pegawai	3.877.059	957.339	4.590.674	243.724	Koreksi atas Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat bulan April tahun 2023 untuk 31 pegawai. Koreksi nominal kekurangan gaji bagi beberapa pegawai atas penyesuaian perhitungan melalui sistem gaji di Semester I. Telah dibayarkan sebagian berdasarkan SPP 01521T tanggal 8 Juli 2024.
3	Kekurangan Gaji atas Kenaikan Pangkat Pengabdian bulan September tahun 2023 a.n. Darajat/1 pegawai	167.900	0	167.900	0	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan September 2023 Telah dibayarkan dengan SPP nomor 02246T tanggal 6 September 2024
4	Kekurangan Tunjangan Kinerja atas Pengangkatan Jabatan Fungsional bulan Januari tahun 2023 s.d. bulan Oktober tahun 2023 a.n. Sarpi dkk./2 pegawai	20.487.560	0	20.487.560	0	Telah dibayarkan dengan Nomor SPP 00090T tanggal 23 Januari 2024
5	Kekurangan Gaji Induk atas Pengangkatan Jabatan Fungsional PKPN bulan April tahun 2024 s.d. bulan Juni tahun 2024 a.n. Rudi Rusli dkk./153 pegawai	0	255.462.300	0	255.462.300	
6	Kekurangan Gaji atas Pengangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional bulan April tahun 2021 s.d. bulan Februari tahun 2025 a.n. Agung Syarifuddin dkk./15	0	123.637.000	0	123.637.000	
7	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala a.n. Achmad Jade dkk./16 pegawai	0	14.268.300	0	14.268.300	
8	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dari Transaksi RPATA	8.972.707.349	32.255.949.024	8.972.707.349	32.255.949.024	Satker melakukan jurnal balik atas penyesuaian nilai Utang Pihak Ketiga tersebut. Selanjutnya nilai Utang yang Belum diterima tagihannya akan berkurang apabila terdapat SPP-Pembayaran.
Total		9.010.472.039	32.650.273.963	8.997.953.483	32.662.792.519	

24. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah dibayarkan oleh *tenant*

untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.699.939.032 dan Rp3.934.330.990. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.699.939.032 terdiri atas:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Pembayaran Yang Dilakukan	Pendapatan Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Des 2024
1	PT BRI (Persero), Tbk	11.416.124.000	5.982.669.100	5.433.454.900
2	Koperasi Prabunara (48)	3.886.848.836	2.024.767.732	1.862.081.104
3	PT BNI (Persero), Tbk	6.629.302.000	5.023.627.972	1.605.674.028
4	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	815.485.000	281.350.000	534.135.000
5	PT Nitraya Bimasakti	529.047.000	352.698.000	176.349.000
6	PT BTN (Persero), Tbk	114.845.000	56.015.000	58.830.000
7	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	180.066.000	150.651.000	29.415.000
	Jumlah	23.571.717.836	13.871.778.804	9.699.939.032

25. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.999.787.340.399 dan Rp1.989.182.706.494. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.315.299.032 dan Rp4.609.006.353. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh para *tenant*, dan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.067.490.369	4.584.931.191	482.559.178	10,52
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	247.808.663	17.575.162	230.233.501	1309,99
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	6.500.000	(6.500.000)	(100,00)
Total	5.315.299.032	4.609.006.353	706.292.679	15,32

Keterangan:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.067.490.369 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh <i>Tenant</i>	10.699.876.637
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	3.934.330.990
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(9.699.939.032)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	133.221.774
	<u>5.067.490.369</u>

- b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp247.808.663 terdiri atas:

- 1) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Penggantian 1 (satu) Unit Genset atas nama PT Trimitra Mandiri Utama sebesar Rp216.066.400;
- 2) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 3 dan *Furniture* atas nama PT. Niscala Karya Konstruksi sebesar Rp16.303.256;
- 3) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *Railing* dan Atap Kanopi *Outdoor Daycare* atas nama PT Heru Adi Konstruksi sebesar Rp4.143.508;
- 4) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Jasa EO Upacara HUT RI ke 79 atas nama Prediksi Aman Sejahtera sebesar Rp2.469.900;

- 5) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pelatihan *Showcasing Leadership Skills* Kementerian BUMN Tahun 2024 atas nama PT. Transforma Sinergi Indonesia sebesar Rp1.831.500;
- 6) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Bongkaran dan Dinding Ruang Tenang atas nama Pandu Ashoka Indonesia Rp1.601.865;
- 7) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan MEP *Outdoor Daycare* atas nama PT Casa Prima Indonesia sebesar Rp1.448.376;
- 8) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *Finishing* Lantai dan Pintu Ruang Tenang atas nama PT Parama Agung Karya sebesar Rp1.238.793;
- 9) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *Plafond* Ruang Tenang atas nama PT Global Sentral Niaga sebesar Rp990.694;
- 10) Denda keterlambatan penyelesaian Paket *Meeting Fullday* dalam rangka *Workshop* Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2024 atas nama PT Hotel Indonesia Natour sebesar Rp598.620;
- 11) Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengawas Renovasi Ruang Tenang atas nama Kanta Karya Utama sebesar Rp448.649;
- 12) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Paket *Meeting* Dalam Rangka Kegiatan *Workshop* Kementerian BUMN Tahun 2024 atas nama PT Hotel Indonesia Natour Rp398.634;
- 13) Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Lantai 3 dan *Furniture* atas nama PT Kanta Karya Utama senilai Rp268.468.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp82.459.343.914 dan Rp71.964.208.043. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun) Antar Tahun
		s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	33.225.175.411	30.916.757.963	2.308.417.448	7,47
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	789.573.472	968.640.504	(179.067.032)	(18,49)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	246.375.856	0	246.375.856	100,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	463.985.390	420.877.082	43.108.308	10,24
5	Belanja Lembur	79.691.000	0	79.691.000	100,00
6	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	47.328.519.643	40.006.959.689	7.321.559.954	18,30
	Jumlah Belanja Kotor	82.133.320.772	72.313.235.238	9.820.085.534	13,58
	Pengembalian Belanja Pegawai	(32.250.763)	(19.947.440)	(12.303.323)	61,68
	Jumlah	82.101.070.009	72.293.287.798	9.807.782.211	13,57
1	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	0	(7.560.000)	7.560.000	100,00
2	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2022	0	(336.240.736)	336.240.736	100,00
3	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2023	(25.246.134)	0	(25.246.134)	100,00
4	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2023	0	24.532.519	(24.532.519)	(100,00)
5	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2024	394.324.939	0	394.324.939	100,00
6	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2024	(10.804.900)	(9.811.538)	(993.362)	10,12
	Total	82.459.343.914	71.964.208.043	10.495.135.871	14,58

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.929.781.441 dan Rp1.889.316.946. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.835.019.529	1.819.118.257	15.901.272	0,87
2	Beban Persediaan Lainnya	94.761.912	70.198.689	24.563.223	34,99
	Total	1.929.781.441	1.889.316.946	40.464.495	2,14

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp122.331.457.751 dan Rp101.579.396.242. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
1	Beban Barang Operasional	19.519.626.533	19.597.379.240	(77.752.707)	(0,40)
2	Beban Barang Non Operasional	13.662.716.674	15.542.762.685	(1.880.046.011)	(12,10)
3	Beban Jasa	89.145.856.694	66.373.694.908	22.772.161.786	34,31
4	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.257.850	65.559.409	(62.301.559)	(95,03)
	Beban Jasa	122.331.457.751	101.579.396.242	20.752.061.509	20,43

a) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.519.626.533 dan Rp19.597.379.240. Rincian Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
1	Belanja Barang Operasional	16.253.071.785	21.484.913.278	(5.231.841.493)	(24,35)
	Jumlah Belanja Kotor	16.253.071.785	21.484.913.278	(5.231.841.493)	(24,35)
	Pengembalian Belanja Barang Operasional	0	(8.378.393)	8.378.393	(100,00)
	Jumlah	16.253.071.785	21.476.534.885	(5.223.463.100)	(24,32)
1	Penyesuaian atas Biaya License, Antivirus, Warranty	3.270.339.689	(1.879.155.645)	5.149.495.334	(274,03)
2	Kelebihan pembayaran PPNPN bulan Des 2024	(3.784.941)	0	(3.784.941)	100,00
	Jumlah	19.519.626.533	19.597.379.240	(77.752.707)	(0,40)

b) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.662.716.674 dan Rp15.542.762.685. Rincian Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
1	Belanja Barang Non Operasional	13.906.861.731	15.293.154.504	(1.386.292.773)	(9,06)
	Jumlah Belanja Kotor	13.906.861.731	15.293.154.504	(1.386.292.773)	(9,06)
	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	(26.311.724)	(1.891.819)	(24.419.905)	1290,82
	Jumlah	13.880.550.007	15.291.262.685	(1.410.712.678)	(9,23)
1	Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka Biaya Pendidikan S1 dan S2 pegawai Kementerian BUMN	(217.833.333)	251.500.000	(469.333.333)	(186,61)
	Jumlah	13.662.716.674	15.542.762.685	(1.880.046.011)	(12,10)

c) Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp89.145.856.694 dan Rp66.373.694.908. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	% naik/ (turun)
		s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
1	Belanja Jasa	92.025.318.971	63.551.160.656	28.474.158.315	44,81
	Jumlah Belanja Kotor	92.025.318.971	63.551.160.656	28.474.158.315	44,81
	Pengembalian Belanja Jasa	0	(67.907.308)	67.907.308	(100,00)
	Jumlah	92.025.318.971	63.483.253.348	28.542.065.623	44,96
1	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	0	(20.718.975)	20.718.975	(100,00)
2	Pelunasan Tunggakan Beban Air Listrik Tahun 2020	0	(656.611)	656.611	(100,00)
3	Penihilan Transaksi RPATA 2024	0	(87.957.854)	87.957.854	(100,00)
4	Hibah Jasa Lainnya	0	2.999.775.000	(2.999.775.000)	(100,00)
5	Penihilan Transaksi RPATA 2025	(137.025.610)	0	(137.025.610)	100,00
6	Penyesuaian atas Biaya License, Antivirus, Warranty	(2.742.436.667)	0	(2.742.436.667)	100,00
	Jumlah	89.145.856.694	66.373.694.908	22.772.161.786	34,31

d) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.257.850 dan Rp65.559.409. Rincian Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d. 31 Des 2024	s.d. 31 Des 2023		
1	Penyesuaian Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.257.850	65.559.409	(62.301.559)	(95,03)
	Jumlah	3.257.850	65.559.409	(62.301.559)	(95,03)

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.383.433.605 dan Rp11.349.906.656. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/(turun)
		s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
1	Belanja Pemeliharaan	15.255.303.565	11.355.318.840	3.899.984.725	34,35
1	Koreksi Pencatatan Voucher BBM	179.650.000	(99.025.000)	278.675.000	(281,42)
2	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57.680.680	60.490.260	(2.809.580)	(4,64)
3	Beban Persediaan Suku Cadang	60.683.229	33.122.556	27.560.673	83,21
4	Belanja dibayar dimuka atas Biaya License, Antivirus, Warranty	(5.152.401.369)	0	(5.152.401.369)	100,00
5	Penyesuaian atas Kode Akun Renovasi Ruang Kerja Lantai 18	(17.482.500)	0	(17.482.500)	100,00
	Jumlah	10.383.433.605	11.349.906.656	(966.473.051)	(8,52)

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.686.929.891 dan Rp28.908.978.993. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.516.559.426	27.670.405.648	2.846.153.778	10,29
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.211.147.232	1.267.552.287	943.594.945	74,44
	Jumlah Belanja Kotor	32.727.706.658	28.937.957.935	3.789.748.723	13,10
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(40.776.767)	(28.978.942)	(11.797.825)	40,71
	Jumlah	32.686.929.891	28.908.978.993	3.777.950.898	13,07

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.545.105.814 dan Rp31.889.387.641. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.188.393.780	17.491.066.696	2.697.327.084	15,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.286.303.626	13.815.554.754	(4.529.251.128)	(32,78)
Beban Penyusutan Jaringan	255.080.784	255.080.784	0	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	533.810.696	0	533.810.696	100,00
Jumlah	30.263.588.886	31.561.702.234	(1.298.113.348)	(4,11)
Beban Amortisasi Software	0	42.633.879	(42.633.879)	(100,00)
Beban Amortisasi Lisensi	281.516.928	283.284.228	(1.767.300)	(0,62)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional	0	1.767.300	(1.767.300)	(100,00)
Jumlah	281.516.928	327.685.407	(46.168.479)	(14,09)
Total	30.545.105.814	31.889.387.641	(1.344.281.827)	(4,22)

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(80.112.841) dan Rp207.877. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 sebesar Rp(80.112.841) merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	s.d 31 Des 2024	s.d 31 Des 2023		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	495.987.393	43.500.000	452.487.393	1.040,20
2 Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	(1.266.737.666)	(61.988.064)	(1.204.749.602)	1.943,52
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(770.750.273)	(18.488.064)	(752.262.209)	4.068,91
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
1 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	3.176.001	169.105.448	(165.929.447)	(98,12)
2 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	201.302.939	192.985.289	8.317.650	4,31
3 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.351.274.766	17.760.000	1.333.514.766	7.508,53
4 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.564.100	0	2.564.100	100,00
5 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(176.955.752)	(41.551.010)	(135.404.742)	325,88
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.381.362.054	338.299.727	1.043.062.327	308,32
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	610.611.781	319.811.663	290.800.118	90,93

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.989.182.706.494 dan Rp1.940.531.687.224.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(274.330.028.762) dan Rp(242.652.584.382). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(328.335.858) dan Rp4.486.123.363. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp(328.335.858) adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang merupakan dampak dari transaksi Koreksi Pencatatan Aset Tetap di Tahun 2024 sebesar Rp(325.175.738) serta Koreksi Hapus Piutang sebesar Rp(3.160.120).

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp285.262.998.525 dan Rp286.817.480.289. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	297.011.269.745
Diterima dari Entitas Lain	(11.830.339.220)
Transfer Masuk	82.068.000
Jumlah	285.262.998.525

Transfer Masuk sebesar Rp82.068.000 merupakan nilai buku dari serah terima BMN berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mekanisme Transfer Masuk berdasarkan BA/3/PL.01.08/S/2024.

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.999.787.340.399 dan Rp1.989.182.706.494.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

Kementerian BUMN sedang melakukan identifikasi seluruh kebutuhan anggaran yang mendukung tupoksi Kementerian BUMN, yang hasilnya akan dituangkan dalam Kerangka Pendanaan (5 tahun) dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian BUMN. Kerangka Pendanaan tersebut akan menjadi dasar dalam pengusulan anggaran setiap tahun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Saat ini Kementerian BUMN juga sedang melakukan finalisasi Kerangka Pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2025-2029 yang akan ditetapkan pada pertengahan Tahun 2025.

2. LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian BUMN
Unit Organisasi	:	Kementerian BUMN
Satuan Kerja	:	Kementerian BUMN
Fungsi	:	Ekonomi
Sub Fungsi	:	Ekonomi
Program	:	Dukungan Manajemen
Lokasi	:	DKI Jakarta

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
2617 Peningkatan Kualitas Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian									
2617	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.338.505.000	1.335.984.947	99,8%	1	1	Layanan	100%
2617	994	Layanan Perkantoran Kementerian BUMN	84.310.156.000	82.489.024.390	97,8%	1	1	Layanan	100%
2617	954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian BUMN	8.496.606.000	8.242.400.667	97,0%	532	532	Orang	100%
2617	'001	Layanan Manajemen Kinerja Organisasi	40.854.000	40.854.000	100,0%	1	1	Layanan	100%
2617	'002	Layanan Penyusunan Rencana Program	1.585.762.000	1.554.423.487	98,0%	1	1	Layanan	100%
2617	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	75.933.000	74.969.645	98,7%	1	1	Dokumen	100%
2617	'001	Layanan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian BUMN	810.979.000	798.976.699	98,5%	1	1	Dokumen	100%
2619 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Rumah Tangga Layanan Administrasi dan Keuangan									
2619	956	Layanan BMN	834.403.000	751.697.775	90,1%	1	1	Layanan	100%
2619	994	Layanan Perkantoran	62.862.911.000	62.013.832.067	98,6%	2	2	Layanan	100%
2619	971	Layanan Prasarana Internal	27.384.837.000	22.709.552.447	82,9%	234	234	Unit	100%
2619	955	Layanan Manajemen Keuangan	1.366.277.000	1.268.890.687	92,9%	2	2	Layanan	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
2619	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.589.263.000	2.488.434.448	96,1%	2	2	Layanan	100%
2620 Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian Bumn									
2620	'001	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	224.219.000	222.166.581	99,1%	1	1	Layanan	100%
2620	'002	Aplikasi Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)	429.850.000	401.703.626	93,5%	1	1	Layanan	100%
2620	965	Layanan Audit Internal	744.410.000	746.392.563	100,3%	16	16	Layanan	100%
4406 Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis Pimpinan									
4406	'001	Layanan Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik	4.173.862.000	4.161.520.281	99,7%	2	2	Layanan	100%
4406	957	Layanan Hukum	26.600.000	26.600.000	100,0%	1	1	Layanan	100%
4406	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	99.843.000	99.843.000	100,0%	1	1	Layanan	100%
4406	959	Layanan Protokol	9.597.346.000	9.597.293.563	100,0%	2	2	Layanan	100%
4406	969	Layanan Bantuan Hukum	625.753.000	625.753.000	100,0%	1	1	Layanan	100%
4407 Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi Minyak dan Gas									
4407	'004	Rumusan kebijakan di bidang BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN	143.592.000	143.591.077	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4407	'005	Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	90.917.000	90.916.307	100,0%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4407	'006	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan sektor hulu dan hilir migas	345.403.000	345.400.387	100,0%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4407	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Energi, Minyak, dan Gas	675.642.000	667.877.842	98,9%	2	2	BUMN	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
4408 Pengembangan BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara									
4408	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka hilirisasi bahan tambang	651.936.000	651.929.300	100,0%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
4408	'005	Rumusan kebijakan di bidang BUMN dalam pengembangan EV Battery	156.711.000	156.711.000	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4408	'006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Unlock Value PT Indonesia Asahan Alumunium	460.458.000	460.285.112	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4408	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara	139.945.000	139.945.000	100,0%	2	2	BUMN	100%
4409 Pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan									
4409	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka konsolidasi BUMN Farmasi	345.208.000	344.435.256	99,8%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
4409	'005	Rumusan kebijakan dalam pengembangan RS Internasional di KEK Kesehatan Sanur	361.620.000	359.862.715	99,5%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
4409	'001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan	363.463.000	357.021.035	98,2%	2	2	BUMN	100%
4410 Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur									
4410	'004	Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pengembangan jasa verifikasi IDSurvey	213.487.000	213.423.370	100,0%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4410	'005	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka mendukung industri pertahanan nasional	192.478.000	192.050.999	99,8%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4410	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Manufaktur	526.059.000	525.363.191	99,9%	2	2	BUMN	100%
4412 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Keuangan									

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
4412	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro	291.527.000	290.767.000	99,7%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
4412	'005	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka integrasi bisnis perbankan BUMN	150.316.000	149.507.000	99,5%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4412	'006	Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur perbankan di IKN	111.126.000	111.125.970	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4412	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Keuangan	300.283.000	295.528.177	98,4%	4	4	BUMN	100%
4413 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur									
4413	'004	Rumusan kebijakan dalam restrukturisasi Waskita Karya dan Wijaya Karya	204.916.000	187.952.418	91,7%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4413	'005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	38.212.000	38.212.000	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4413	'006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Monitoring dan Evaluasi Penggunaan PMN Adhi Karya, Perumnas, dan Semen Indonesia	743.236.000	733.030.409	98,6%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4413	'001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	252.216.000	250.204.574	99,2%	9	9	BUMN	100%
4414 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun									
4414	'004	Rumusan Kebijakan dalam rangka penerapan PSAK 74	173.953.000	173.952.928	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4414	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	645.167.000	625.920.187	97,0%	5	5	BUMN	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
4415 Pengembangan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan									
4415	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka restrukturisasi BUMN perkebunan dan kehutanan	491.858.000	491.696.630	100,0%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
4415	'005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam Peningkatan Swasembada Gula	167.285.000	166.884.536	99,8%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4415	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	447.931.000	447.863.096	100,0%	5	5	BUMN	100%
4416 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung									
4416	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Bandara	339.772.000	339.772.000	100,0%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
4416	'005	Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur bandara IKN	486.064.000	486.063.700	100,0%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
4416	'006	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas	253.832.000	251.734.434	99,2%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4416	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	356.154.000	356.154.000	100,0%	3	3	BUMN	100%
4418 Peningkatan Pengelolaan Risiko BUMN									
4418	'001	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BUMN	1.264.857.000	1.248.154.992	98,7%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4419 Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN									
4419	'001	Rumusan Kebijakan Pendalaman Tata Kelola BUMN	282.723.000	336.022.000	118,9%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
4419	'002	Rumusan Kebijakan Inventarisasi dan Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN	581.377.000	506.229.158	87,1%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4419	'001	Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN	610.509.000	601.880.186	98,6%	1	1	Badanusaha	100%
4420 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum									
4420	'001	Rumusan Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengawasan BUMN bidang Hukum	1.227.844.000	1.181.300.651	96,2%	13	13	Rekomendasi Kebijakan	100%
4420	'002	Perumusan Kebijakan Strategis mengenai Penugasan Khusus kepada BUMN dan Dukungan Regulasi Peningkatan Laba BUMN untuk Pemerintah	954.166.000	951.537.069	99,7%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4420	'003	Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMN dalam Perundingan Internasional	618.120.000	617.463.838	99,9%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4421 Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN									
4421	'001	Laporan Kinerja BUMN	15.480.363.000	12.997.236.437	84,0%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
4421	'002	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	491.447.000	454.721.836	92,5%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
4421	'003	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN	87.338.000	84.082.530	96,3%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
4828 Pengembangan BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk									
4828	'004	Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMN dalam rangka Restrukturisasi dan Transformasi oleh ID FOOD dan PIHC	501.837.000	501.832.491	100,0%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
4828	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	387.385.000	379.547.919	98,0%	3	3	BUMN	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
5810 Peningkatan Kualitas SDM BUMN									
5810	'001	Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan	354.577.000	354.575.452	100,0%	36	36	Rekomendasi Kebijakan	100%
5810	'002	Rumusan Kebijakan Strategis terkait Manajemen Talenta BUMN	1.279.932.000	1.262.060.837	98,6%	8	8	Rekomendasi Kebijakan	100%
5810	'003	Rumusan Kebijakan Strategis terkait Remunerasi Pengurus BUMN	4.397.219.000	4.381.074.618	99,6%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
5811 Pengembangan Teknologi dan Informasi BUMN yang mendukung kinerja									
5811	'002	Rumusan kebijakan strategis terkait pembinaan BUMN	2.048.663.000	1.973.979.392	96,4%	7	7	Rekomendasi Kebijakan	100%
5811	'001	Aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dibangun	55.042.794.000	52.421.415.198	95,2%	8	8	SistemInformasi	100%
5813 Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN									
5813	'002	Hasil pembinaan BUMN dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1.172.207.000	1.171.663.331	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
5813	'003	Rumusan Kebijakan Implementasi Best Practice Program TJSL	660.382.000	660.380.357	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
5813	'004	Rumusan Kebijakan Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	379.625.000	378.862.801	99,8%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
6601 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media									
6601	'004	Rumusan Kebijakan Restrukturisasi BUMN	114.316.000	114.314.000	100,0%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
6601	'005	Rumusan Kebijakan Penatakelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN)	141.363.000	141.361.912	100,0%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%

Kegiatan	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
6601	'006	Rumusan Kebijakan Penatakelolaan Holding Danareksa	117.686.000	117.673.928	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
6601	'001	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	645.068.000	640.664.678	99,3%	8	8	BUMN	100%
6602 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Logistik									
6602	'004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengawasan BUMN sektor Perkeretaapian	316.799.000	316.643.023	100,0%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
6602	'005	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan kawasan pelabuhan	107.987.000	107.987.000	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
6602	'006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik	577.286.000	577.168.273	100,0%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
6602	'001	Hasil pengembangan BUMN Sektor Jasa Logistik	433.120.000	433.118.684	100,0%	7	7	BUMN	100%

3. KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BARANG ASET TETAP/ATB

Terdapat ketidaksesuaian akun vs kode barang Aset Tetap/ATB pada Kementerian BUMN atas Pengadaan Perangkat Audio dan Visual Ballroom Lantai 17 dengan kode MAK 532111 (Belanja Peralatan dan Mesin) yang didalamnya terdapat beberapa barang ekstrakomtabel dengan nilai di bawah nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1.000.000). Atas hal tersebut, pencatatan dan pengakuan atas barang dimaksud di atas telah disesuaikan dengan substansi asetya. Adapun rincian barang tersebut sebagai berikut:

No	Kontrak	Tanggal Dokumen	Akun	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
1	SP-29/PPK5.MBU/12/2024	31-12-2024	532111	3100204040	2	993.450	1.986.900
				3050206080	1	771.450	771.450

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
ESELON I : 01 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 606538 **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 3:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	495,987,393	0	495,987,393	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10,948,482,000	10,699,876,637	0	10,699,876,637	97.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	10,948,482,000	11,195,864,030	0	11,195,864,030	102.26
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	6,000,000	0	6,000,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	328,593,340	0	328,593,340	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	328,593,340	0	328,593,340	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,621,057	0	10,621,057	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	289,260,793	0	289,260,793	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	299,881,850	0	299,881,850	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	10,948,482,000	11,830,339,220	0	11,830,339,220	108.05
	JUMLAH PENDAPATAN	10,948,482,000	11,830,339,220	0	11,830,339,220	108.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 5:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,084,245,000	23,876,978,000	23,638,241,150	18,964,492	23,619,276,658	98.92	257,701,342
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	516,000	491,000	378,720	15,955	362,765	73.88	128,235
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,566,800,000	1,408,555,000	1,392,080,950	0	1,392,080,950	98.83	16,474,050
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	424,500,000	368,920,000	354,337,860	0	354,337,860	96.05	14,582,140
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,331,000,000	1,843,360,000	1,841,110,000	0	1,841,110,000	99.88	2,250,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	834,800,000	1,591,601,000	1,120,559,000	0	1,120,559,000	70.4	471,042,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	152,750,000	374,325,000	267,780,451	0	267,780,451	71.54	106,544,549
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,209,800,000	1,092,940,000	1,088,762,280	0	1,088,762,280	99.62	4,177,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,780,110,000	3,172,918,000	3,062,665,000	0	3,062,665,000	96.53	110,253,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	919,582,000	478,960,000	459,260,000	3,500,020	455,759,980	95.16	23,200,020
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	39,304,103,000	34,209,048,000	33,225,175,411	22,480,467	33,202,694,944	97.06	1,006,353,056
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	483,104,000	359,480,000	264,573,472	0	264,573,472	73.6	94,906,528
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	840,000,000	525,000,000	525,000,000	0	525,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,323,104,000	884,480,000	789,573,472	0	789,573,472	89.27	94,906,528
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	263,500,000	246,375,856	0	246,375,856	93.5	17,124,144
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	263,500,000	246,375,856	0	246,375,856	93.5	17,124,144
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	257,778,000	278,661,000	194,368,200	0	194,368,200	69.75	84,292,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	4,000	2,058	0	2,058	51.45	1,942
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,670,000	14,595,000	13,255,380	0	13,255,380	90.82	1,339,620
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,312,000	5,660,000	4,945,152	0	4,945,152	87.37	714,848
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	278,250,000	264,000,000	242,000,000	0	242,000,000	91.67	22,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,000,000	10,791,000	9,414,600	0	9,414,600	87.24	1,376,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	50,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	619,016,000	573,711,000	463,985,390	0	463,985,390	80.87	109,725,610
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	0	98,036,000	79,691,000	0	79,691,000	81.29	18,345,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	0	98,036,000	79,691,000	0	79,691,000	81.29	18,345,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	40,819,842,000	45,793,000,000	45,484,605,811	9,770,296	45,474,835,515	99.31	318,164,485

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 5:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,422,240,000	2,060,880,000	1,843,913,832	0	1,843,913,832	89.47	216,966,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	42,242,082,000	47,853,880,000	47,328,519,643	9,770,296	47,318,749,347	98.88	535,130,653
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	83,488,305,000	83,882,655,000	82,133,320,772	32,250,763	82,101,070,009	97.88	1,781,584,991
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,870,825,000	10,590,866,000	10,560,951,329	0	10,560,951,329	99.72	29,914,671
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,833,000	5,376,000	4,390,000	0	4,390,000	81.66	986,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,267,280,000	552,861,000	443,911,000	0	443,911,000	80.29	108,950,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,155,674,000	5,252,961,000	5,243,819,456	0	5,243,819,456	99.83	9,141,544
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,313,612,000	16,402,064,000	16,253,071,785	0	16,253,071,785	99.09	148,992,215
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,911,964,000	7,859,488,000	7,702,178,645	1,899,224	7,700,279,421	97.97	159,208,579
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,243,640,000	1,455,853,000	1,429,442,368	24,412,500	1,405,029,868	96.51	50,823,132
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,365,221,000	4,850,780,000	4,775,240,718	0	4,775,240,718	98.44	75,539,282
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	500,000	499,500	0	499,500	99.9	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,520,825,000	14,166,621,000	13,907,361,231	26,311,724	13,881,049,507	97.98	285,571,493
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,562,000,000	2,315,300,000	2,313,233,955	0	2,313,233,955	99.91	2,066,045
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,562,000,000	2,315,300,000	2,313,233,955	0	2,313,233,955	99.91	2,066,045
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	6,700,000,000	7,064,715,000	6,964,747,160	0	6,964,747,160	98.58	99,967,840
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	156,000,000	10,315,848	0	10,315,848	6.61	145,684,152
522113	Belanja Langganan Air	336,000,000	446,400,000	441,509,990	0	441,509,990	98.9	4,890,010
522131	Belanja Jasa Konsultansi	8,941,045,000	10,945,531,000	10,898,261,309	0	10,898,261,309	99.57	47,269,691
522141	Belanja Sewa	14,930,616,000	17,863,868,000	17,786,048,138	0	17,786,048,138	99.56	77,819,862
522151	Belanja Jasa Profesi	3,832,050,000	1,212,272,000	1,106,358,975	0	1,106,358,975	91.26	105,913,025
522191	Belanja Jasa Lainnya	54,977,407,000	55,402,761,000	54,818,077,551	0	54,818,077,551	98.94	584,683,449
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	89,789,118,000	93,091,547,000	92,025,318,971	0	92,025,318,971	98.85	1,066,228,029
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750,000,000	1,082,531,000	1,069,003,135	0	1,069,003,135	98.75	13,527,865
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	800,000,000	697,000,000	696,861,627	0	696,861,627	99.98	138,373
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,668,507,000	8,164,574,000	8,097,190,032	0	8,097,190,032	99.17	67,383,968
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	26,150,000	25,601,400	0	25,601,400	97.9	548,600
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,248,746,000	5,420,031,000	5,366,647,371	0	5,366,647,371	99.02	53,383,629

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 606538
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 5:07 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 4:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	11,492,253,000	15,390,286,000	15,255,303,565	0	15,255,303,565	99.12	134,982,435
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,343,725,000	14,334,706,000	13,861,242,011	32,498,357	13,828,743,654	96.47	505,962,346
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,718,494,000	857,154,000	822,548,530	1,762,000	820,786,530	95.76	36,367,470
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,146,911,000	5,784,624,000	5,675,410,359	170,000	5,675,240,359	98.11	109,383,641
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,158,554,000	12,125,891,000	10,157,358,526	6,346,410	10,151,012,116	83.71	1,974,878,884
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	36,367,684,000	33,102,375,000	30,516,559,426	40,776,767	30,475,782,659	92.07	2,626,592,341
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,861,228,000	2,211,861,000	2,211,147,232	0	2,211,147,232	99.97	713,768
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,173,923,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	6,035,151,000	2,211,861,000	2,211,147,232	0	2,211,147,232	99.97	713,768
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	185,080,643,000	176,680,054,000	172,481,996,165	67,088,491	172,414,907,674	97.59	4,265,146,326
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,421,178,000	32,774,360,000	32,118,161,962	0	32,118,161,962	98	656,198,038
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	245,198,000	242,207,500	0	242,207,500	98.78	2,990,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	10,421,178,000	33,019,558,000	32,360,369,462	0	32,360,369,462	98	659,188,538
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,280,000,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	11,746,000,000	14,433,859,000	10,134,922,600	0	10,134,922,600	70.22	4,298,936,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	29,026,000,000	14,433,859,000	10,134,922,600	0	10,134,922,600	70.22	4,298,936,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	39,447,178,000	47,453,417,000	42,495,292,062	0	42,495,292,062	89.55	4,958,124,938
	JUMLAH BELANJA	308,016,126,000	308,016,126,000	297,110,608,999	99,339,254	297,011,269,745	96.43	11,004,856,255

NERACA PERCOBAAN AKRUAL SALDO AWAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 606538

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 08/05/2025 5:12 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	5,356,051,289	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	2,626,600,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	164,471,926	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,137,478	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	81,203,113
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,687
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,665,916,155	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	108,461,700	0
0.0	117114	Suku Cadang	24,297,103	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	29,321,305	0
0.0	131111	Tanah	1,468,058,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	150,009,750,037	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	502,779,300,372	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,040,842,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	115,794,005,309
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	50,638,577,879
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,013,027,548
0.0	138311	Properti Investasi	21,349,361,185	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	3,466,702,900
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	121,204
0.0	162151	Software	13,313,434,032	0
0.0	162161	Lisensi	2,815,169,280	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	11,344,665,203	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,500,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 606538

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl. Cetak 08/05/2025 5:12 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,500,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	13,313,434,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,111,376,960
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	37,764,690
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,972,707,349
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	3,934,330,990
0.0	391111	Ekuitas	0	1,989,182,706,494
JUMLAH			2,189,549,771,655	2,189,549,771,655

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 5:13 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	10,018,732,969	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	216,909,023	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	63,106,263	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	1,084,547
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	315,532
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,708,309,235	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,496,360	0
0.0	117114	Suku Cadang	54,560,733	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	49,326,888	0
0.0	131111	Tanah	1,448,189,807,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	185,711,620,850	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	509,546,340,272	0
0.0	134113	Jaringan	7,706,388,680	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,822,096	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	132,437,479,404
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	59,611,399,403
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,268,108,332
0.0	138311	Properti Investasi	21,349,361,185	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	4,000,513,596
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	18,240,748	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	91,204
0.0	162151	Software	13,115,434,032	0
0.0	162161	Lisensi	2,815,169,280	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	32,392,974,634	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,500,000	0
0.0	166114	BMN Dalam Proses PMPP	23,194,600,000	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	299,290,860
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,500,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	13,115,434,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,392,893,888
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	406,843,495
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	32,255,949,024
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	9,699,939,032
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	297,011,269,745
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,830,339,220	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 5:13 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	82,068,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,989,182,706,494
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	325,175,738	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	3,160,120	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	495,987,393
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,067,490,369
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	247,808,663
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,176,001
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	201,302,939
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,351,274,766
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	2,564,100
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	23,998,038,123	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	362,765	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,392,080,950	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	354,337,860	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,841,110,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,100,071,440	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	267,780,451	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,088,762,280	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,062,665,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	455,759,980	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	264,573,472	0
3.0	511337	Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	525,000,000	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	246,375,856	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	194,368,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,058	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,255,380	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,945,152	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	242,000,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9,414,600	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	79,691,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	45,474,835,515	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,843,913,832	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	13,827,506,077	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,390,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	443,911,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,243,819,456	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,700,279,421	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 5:13 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,405,029,868	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,557,407,385	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,758,350	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,964,747,160	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	10,315,848	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	441,509,990	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	10,898,261,309	0
3.0	522141	Beban Sewa	17,716,989,536	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,106,358,975	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	52,007,673,876	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,069,003,135	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	696,861,627	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,335,341,942	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,601,400	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,138,261,592	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13,828,743,654	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	820,786,530	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,675,240,359	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,151,012,116	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,211,147,232	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20,202,585,022	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,272,112,384	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	255,080,784	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	533,810,696	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	281,516,928	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,835,019,529	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57,680,680	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	60,683,229	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	94,761,912	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	176,955,752	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	80,118,566
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	35,725	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	30,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	499,500	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,266,737,666	0
JUMLAH			2,550,218,656,885	2,550,218,656,885

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDUS WINARNO
NIP 197109141996031001

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 5:14 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	297,011,269,745
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	11,830,339,220	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	495,987,393
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,699,876,637
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	6,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	328,593,340
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,621,057
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	289,260,793
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	23,638,241,150	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	378,720	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,392,080,950	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	354,337,860	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,841,110,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,120,559,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	267,780,451	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,088,762,280	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,062,665,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	459,260,000	0
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	264,573,472	0
3.0	511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	525,000,000	0
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	246,375,856	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	194,368,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,058	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,255,380	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,945,152	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	242,000,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,414,600	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	79,691,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	45,484,605,811	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,843,913,832	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,560,951,329	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,390,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	443,911,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,243,819,456	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,702,178,645	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,429,442,368	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,775,240,718	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (606538) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 5:14 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	499,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,313,233,955	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	6,964,747,160	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	10,315,848	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	441,509,990	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	10,898,261,309	0
3.0	522141	Belanja Sewa	17,786,048,138	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,106,358,975	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	54,818,077,551	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,069,003,135	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	696,861,627	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,097,190,032	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,601,400	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,366,647,371	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,861,242,011	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	822,548,530	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,675,410,359	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,157,358,526	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,211,147,232	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,118,161,962	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	242,207,500	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10,134,922,600	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	18,964,492
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	15,955
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,500,020
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	9,770,296
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	1,899,224
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	24,412,500
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	32,498,357
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,762,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	170,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	6,346,410
JUMLAH			308,940,948,219	308,940,948,219

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl.Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl.Cetak : 08/05/25 3:51 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,706,911,771
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,706,240
117114	Suku Cadang	56,384,997
117199	Persediaan Lainnya	48,690,208
131111	Tanah	1,448,189,807,000
132111	Peralatan dan Mesin	185,711,620,850
133111	Gedung dan Bangunan	509,546,340,272
134113	Jaringan	7,706,388,680
135121	Aset Tetap Lainnya	15,822,096
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(132,437,479,404)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59,611,399,403)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,268,108,332)
138311	Properti Investasi	21,349,361,185
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4,000,513,596)
162151	Software	13,115,434,032
162161	Lisensi	2,815,169,280
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,500,000
166114	BMN Dalam Proses PMPP	23,194,600,000
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(299,290,860)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,500,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(13,115,434,032)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,392,893,888)
J U M L A H		1,999,438,117,096

LAPORAN PERSEDIAAN

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tanggal : 08/05/25 4:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	49,218,601
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	7,770
1010301003	Penjepit Kertas	18,179,629
1010301004	Penghapus/Korektor	4,448,237
1010301005	Buku Tulis	6,436,095
1010301006	Ordner Dan Map	190,566,696
1010301007	Penggaris	175,324
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	4,242,420
1010301009	Pita Mesin Ketik	2,358,750
1010301010	Alat Perekat	7,388,260
1010301014	Barang Cetak	32,300,645
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	87,759,051
1010302001	Kertas HVS	175,810,238
1010302002	Berbagai Kertas	63,071,015
1010302003	Kertas Cover	1,118,880
1010302004	Amplop	19,135,718
1010302005	Kop Surat	143,533,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	3,966,054
1010304004	Tinta/Toner Printer	884,385,119
1010304006	USB/Flash Disk	1,538,460
1010306010	Batu Baterai	7,679,622
1010701002	Minuman	3,592,187
Jumlah Barang Konsumsi		1,706,911,771
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	106,706,240
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		106,706,240
117114	Suku Cadang	
1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	56,384,997
Jumlah Suku Cadang		56,384,997
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	9,181,563
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	32,837,004
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	6,671,641
Jumlah Persediaan Lainnya		48,690,208
TOTAL		1,918,693,216

Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 41,551,010 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:52 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		18,122	1,468,058,953,000	0	0	346	19,869,146,000	17,776	1,448,189,807,000
20101	TANAH PERSIL	-	18,122	1,468,058,953,000	0	0	346	19,869,146,000	17,776	1,448,189,807,000
132111	Peralatan dan Mesin		7,586	150,009,750,037	1,345	42,774,870,408	93	7,072,999,595	8,838	185,711,620,850
30103	ALAT BANTU	-	15	20,185,098,171	7	243,783,700	1	3,162,112,554	21	17,266,769,317
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	27	7,866,284,600	0	0	9	1,452,034,000	18	6,414,250,600
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	28	56,807,100	0	0	0	0	28	56,807,100
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	86	2,903,713,437	2	3,574,200	0	0	88	2,907,287,637
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	6,390,600	0	0	0	0	4	6,390,600
30303	ALAT UKUR	-	1	1,658,800	0	0	0	0	1	1,658,800
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	11,644,050	0	0	0	0	6	11,644,050
30501	ALAT KANTOR	-	1,530	11,006,255,612	133	756,234,389	0	68,653,500	1,663	11,693,836,501
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	4,308	39,831,670,324	993	6,215,316,141	1	1,096,575,438	5,300	44,950,411,027
30601	ALAT STUDIO	-	190	5,207,997,170	103	2,286,623,625	0	0	293	7,494,620,795
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	56	325,396,190	4	2,385,325,750	0	0	60	2,710,721,940
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	114,524,679	7	10,682,595,150	0	0	8	10,797,119,829
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	28	213,861,630	0	0	0	0	28	213,861,630
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	6,500,802	0	0	0	0	2	6,500,802
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	36	6,047,181,972	4	39,849,000	0	0	40	6,087,030,972
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1	4,884,000	0	0	0	0	1	4,884,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4	25,951,200	7	41,609,000	0	0	11	67,560,200
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	2	26,313,980	0	0	0	0	2	26,313,980
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	29,920,000	0	0	0	0	1	29,920,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	844	17,160,345,635	8	208,887,300	82	1,269,814,603	770	16,099,418,332
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	369	38,489,046,556	70	19,774,486,653	0	0	439	58,263,533,209
31503	ALAT SAR	-	2	199,796,453	0	0	0	0	2	199,796,453
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	1,332,000	0	0	0	0	1	1,332,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	1	75,042,000	0	0	0	0	1	75,042,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	43	212,133,076	7	136,585,500	0	23,809,500	50	324,909,076
133111	Gedung dan Bangunan		3	502,779,300,372	0	10,252,693,600	1	3,485,653,700	2	509,546,340,272
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	502,779,300,372	0	10,252,693,600	1	3,485,653,700	2	509,546,340,272
134113	Jaringan		3	7,706,388,680	0	0	0	0	3	7,706,388,680
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	7,077,847,260	0	0	0	0	1	7,077,847,260
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	451,399,180	0	0	0	0	1	451,399,180
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	177,142,240	0	0	0	0	1	177,142,240
135121	Aset Tetap Lainnya		3,047	1,066,410,162	0	0	2,905	1,050,588,066	142	15,822,096
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,026	576,910,162	0	0	2,884	561,088,066	142	15,822,096

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:52 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	21	489,500,000	0	0	21	489,500,000	0	0
138311	Properti Investasi		1	21,349,361,185	0	0	0	0	1	21,349,361,185
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	21,349,361,185	0	0	0	0	1	21,349,361,185
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	3,500,000	2,997	6,888,462,023	2,997	6,888,462,023	1	3,500,000
30103	ALAT BANTU	-	0	0	1	3,133,430,154	1	3,133,430,154	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	9	1,452,034,000	9	1,452,034,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	82	1,252,409,803	82	1,252,409,803	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	0	0	2,884	561,088,066	2,884	561,088,066	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	0	0	21	489,500,000	21	489,500,000	0	0
166114	BMN Dalam Proses PMPP		0	0	347	23,194,600,000	0	0	347	23,194,600,000
20101	TANAH PERSIL	-	0	0	346	19,869,146,000	0	0	346	19,869,146,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	0	0	1	3,325,454,000	0	0	1	3,325,454,000
TOTAL				2,150,973,663,436		83,110,626,031		38,366,849,384		2,195,717,440,083

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA EKSTRAKOMTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/25 7:22 PM
Tanggal : 04/05/25 10:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	296	193,853,488	27	17,429,122	0	888,000	323	210,394,610
30501	ALAT KANTOR	20	11,655,000	0	0	0	0	20	11,655,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	257	168,245,488	25	15,442,222	0	888,000	282	182,799,710
30601	ALAT STUDIO	7	6,160,000	0	0	0	0	7	6,160,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	4,367,000	0	0	0	0	8	4,367,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	3,426,000	0	0	0	0	4	3,426,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	2	1,986,900	0	0	2	1,986,900
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			193,853,488		17,429,122		888,000		210,394,610

ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tanggal : 08/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		1,872	13,313,434,032	0	0	2	198,000,000	1,870	13,115,434,032
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1,872	13,313,434,032	0	0	2	198,000,000	1,870	13,115,434,032
162161	Lisensi		1	2,815,169,280	0	0	0	0	1	2,815,169,280
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	2,815,169,280	0	0	0	0	1	2,815,169,280
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		0	0	2	198,000,000	2	198,000,000	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	2	198,000,000	2	198,000,000	0	0
TOTAL				16,128,603,312		198,000,000		396,000,000		15,930,603,312

LAPORAN PENYUSUTAN INTRAKOMTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		17,776	1,448,189,807,000	0	0	0	1,448,189,807,000
20101	TANAH PERSIL	-	17,776	1,448,189,807,000	0	0	0	1,448,189,807,000
132111	Peralatan dan Mesin		8,838	185,711,620,850	(115,794,005,309)	(16,643,474,095)	(132,437,479,404)	53,274,141,446
30103	ALAT BANTU	-	21	17,266,769,317	(11,701,251,833)	953,456,380	(10,747,795,453)	6,518,973,864
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	18	6,414,250,600	(6,941,884,599)	1,225,791,143	(5,716,093,456)	698,157,144
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	28	56,807,100	(49,376,100)	(4,954,000)	(54,330,100)	2,477,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	88	2,907,287,637	(1,928,489,036)	(289,374,044)	(2,217,863,080)	689,424,557
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	6,390,600	(6,390,600)	0	(6,390,600)	0
30303	ALAT UKUR	-	1	1,658,800	(1,658,800)	0	(1,658,800)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	11,644,050	(11,644,050)	0	(11,644,050)	0
30501	ALAT KANTOR	-	1,663	11,693,836,501	(8,199,430,099)	(1,578,309,875)	(9,777,739,974)	1,916,096,527
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	5,300	44,950,411,027	(31,607,704,148)	(6,218,024,866)	(37,825,729,014)	7,124,682,013
30601	ALAT STUDIO	-	293	7,494,620,795	(3,902,885,511)	(874,402,060)	(4,777,287,571)	2,717,333,224
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	60	2,710,721,940	(236,396,653)	(279,786,529)	(516,183,182)	2,194,538,758
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8	10,797,119,829	(62,988,574)	(835,292,468)	(898,281,042)	9,898,838,787
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	28	213,861,630	(137,925,406)	(39,516,326)	(177,441,732)	36,419,898
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	6,500,802	(3,900,480)	(1,300,160)	(5,200,640)	1,300,162
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	40	6,087,030,972	(5,791,097,203)	(98,072,662)	(5,889,169,865)	197,861,107
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1	4,884,000	(348,857)	(697,714)	(1,046,571)	3,837,429
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	11	67,560,200	(4,102,487)	(4,297,347)	(8,399,834)	59,160,366
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	2	26,313,980	(17,305,442)	(2,573,868)	(19,879,310)	6,434,670
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	29,920,000	(29,920,000)	0	(29,920,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	770	16,099,418,332	(11,303,218,703)	(1,739,730,567)	(13,042,949,270)	3,056,469,062
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	439	58,263,533,209	(33,464,287,055)	(6,793,328,646)	(40,257,615,701)	18,005,917,508
31503	ALAT SAR	-	2	199,796,453	(199,796,453)	0	(199,796,453)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	1,332,000	(83,250)	(166,500)	(249,750)	1,082,250
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	1	75,042,000	(42,881,144)	(10,720,286)	(53,601,430)	21,440,570
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	50	324,909,076	(149,038,826)	(52,173,700)	(201,212,526)	123,696,550
133111	Gedung dan Bangunan		2	509,546,340,272	(50,638,577,879)	(8,972,821,524)	(59,611,399,403)	449,934,940,869
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	509,546,340,272	(50,638,577,879)	(8,972,821,524)	(59,611,399,403)	449,934,940,869
134113	Jaringan		3	7,706,388,680	(2,013,027,548)	(255,080,784)	(2,268,108,332)	5,438,280,348
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	7,077,847,260	(1,645,186,987)	(231,177,032)	(1,876,364,019)	5,201,483,241
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	451,399,180	(248,269,549)	(15,046,640)	(263,316,189)	188,082,991
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	177,142,240	(119,571,012)	(8,857,112)	(128,428,124)	48,714,116
135121	Aset Tetap Lainnya		142	15,822,096	0	0	0	15,822,096
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	142	15,822,096	0	0	0	15,822,096
138311	Properti Investasi		1	21,349,361,185	(3,466,702,900)	(533,810,696)	(4,000,513,596)	17,348,847,589

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:53 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	21,349,361,185	(3,466,702,900)	(533,810,696)	(4,000,513,596)	17,348,847,589
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	3,500,000	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	3,500,000	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
JUMLAH			26,763	2,172,522,840,083	(171,915,813,636)	(26,405,187,099)	(198,321,000,735)	1,974,201,839,348

LAPORAN PENYUSUTAN EKSTRAKOMTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		323	210,394,610	(87,501,456)	(41,532,299)	(129,033,755)	81,360,855
30501	ALAT KANTOR	-	20	11,655,000	(3,496,500)	(2,331,000)	(5,827,500)	5,827,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	282	182,799,710	(75,803,180)	(36,419,287)	(112,222,467)	70,577,243
30601	ALAT STUDIO	-	7	6,160,000	(4,312,000)	(1,232,000)	(5,544,000)	616,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	8	4,367,000	(3,056,900)	(873,400)	(3,930,300)	436,700
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	4	3,426,000	(832,876)	(428,250)	(1,261,126)	2,164,874
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	2	1,986,900	0	(248,362)	(248,362)	1,738,538
JUMLAH			323	210,394,610	(87,501,456)	(41,532,299)	(129,033,755)	81,360,855

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UAKPB : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tgl Data : 08/05/25 1:36 PM
Tanggal : 08/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		1,870	13,115,434,032	(13,313,434,032)	198,000,000	(13,115,434,032)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1,870	13,115,434,032	(13,313,434,032)	198,000,000	(13,115,434,032)	0
162161	Lisensi		1	2,815,169,280	(2,111,376,960)	(281,516,928)	(2,392,893,888)	422,275,392
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	2,815,169,280	(2,111,376,960)	(281,516,928)	(2,392,893,888)	422,275,392
JUMLAH			1,871	15,930,603,312	(15,424,810,992)	(83,516,928)	(15,508,327,920)	422,275,392

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)
NOMOR: BAR-2/KPB.MBU/5/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arief Maulana
NIP : 199002232015031002
Jabatan : Subkoordinator

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Sukamdani Eko Basuki
NIP : 198404102006021001
Jabatan : Subkoordinator Verifikasi dan Akuntansi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara BMN pada lingkup Kementerian BUMN dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan BMN yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun 2024 (Audited) dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2024 (Audited)		
		Nilai MAT	Nilai GLP	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	1.999.438.117.096	1.999.438.117.096	0
A	ASET LANCAR	1.918.693.216	1.918.693.216	0
1	Persediaan	1.918.693.216	1.918.693.216	0
B	ASET TETAP	1.956.852.991.759	1.956.852.991.759	0
1	Tanah	1.448.189.807.000	1.448.189.807.000	0
2	Peralatan dan Mesin	185.711.620.850	185.711.620.850	0
3	Gedung dan Bangunan	509.546.340.272	509.546.340.272	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	7.706.388.680	0
5	Aset Tetap Lainnya	15.822.096	15.822.096	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	0	0
8	Akum. Penyusutan Aset Tetap	-194.316.987.139	-194.316.987.139	0
C	PROPERTI INVESTASI	17.348.847.589	17.348.847.589	0
1	Properti Investasi	21.349.361.185	21.349.361.185	0
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-4.000.513.596	-4.000.513.596	0
D	ASET LAINNYA	23.317.584.532	23.317.584.532	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	15.930.603.312	15.930.603.312	0
3	Aset Lain-lain	23.198.100.000	23.198.100.000	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	-15.811.118.780	-15.811.118.780	0

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2024 (Audited)		
		Nilai MAT	Nilai GLP	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	BMN NON NERACA*	4.708.376.019	0	4.666.825.009
A	EKSTRAKOMPTABEL*	81.360.855	0	81.360.855
1	BMN Ekstrakomptabel*	210.394.610	0	210.394.610
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel*	-129.033.755	0	-129.033.755
B	BPYBDS*	0	0	0
C	BARANG HILANG*	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT*	4.585.464.154	0	4.585.464.154
E	BARANG PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN*	0	0	0
F	BARANG PERSEDIAAN RUSAK/USANG*	41.551.010	0	41.551.010
TOTAL (I + II)		2.004.146.493.115	1.999.438.117.096	4.666.825.009

*) Barang Milik Negara Non Neraca disajikan dalam Laporan BMN dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited), dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Subkoordinator

Arief Maulana
NIP 199002232015031002

**Subkoordinator Verifikasi
dan Akuntansi**

Sukamdani Eko Basuki
NIP 198404102006021001

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA041)
TAHUN 2024

Nomor: NKF-36/041/PB.6/2025

Pada hari **Rabu, 07 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BA 041)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2025.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Sutrisno, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA – selaku Penyusun LKKL
2	Idris Aswin , Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara III	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Indriasari Kusumadewi, Ketua Tim	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L





LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	11,830,339,220	0	11,830,339,220
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0
Pendapatan BLU	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,830,339,220	0	11,830,339,220
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	11,830,339,220	0	11,830,339,220
Belanja Negara	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	297,011,269,745	0	297,011,269,745
Belanja Pegawai	82,101,070,009	0	82,101,070,009
Belanja Barang	172,414,907,674	0	172,414,907,674
Belanja Modal	42,495,292,062	0	42,495,292,062
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0
Dana Transfer Umum	0	0	0
Dana Bagi Hasil	0	0	0
Dana Alokasi Umum	0	0	0
Dana Transfer Khusus	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	0	0
Dana Keistimewaan DIY	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Desa	0	0	0
Hibah Kepada Daerah	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	297,011,269,745	0	297,011,269,745
PEMBIAYAAN	0	0	0



KERTAS KERJA NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
ASET	0	0	0
ASET LANCAR	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	0	0	0
Kas pada BLU	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	10,018,732,969	0	10,018,732,969
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0
Piutang Perpajakan	0	0	0
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	280,015,286	0	280,015,286
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-1,400,079	0	-1,400,079
Bagian Lancar TPA	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	3,500,000	0	3,500,000
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-17,500	0	-17,500
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	0	0	0
Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0	0
Persediaan	2,109,293,882	-190,600,666	1,918,693,216
Persediaan yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	12,410,124,558	-190,600,666	12,219,523,892
ASET TETAP	0	0	0
Tanah	1,448,189,807,000	0	1,448,189,807,000
Peralatan dan Mesin	185,582,612,150	129,008,700	185,711,620,850
Gedung dan Bangunan	509,675,348,972	-129,008,700	509,546,340,272
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,706,388,680	0	7,706,388,680
Aset Tetap Lainnya	15,822,096	0	15,822,096
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-194,305,376,641	-11,610,498	-194,316,987,139
Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	1,956,864,602,257	-11,610,498	1,956,852,991,759
PROPERTI INVESTASI	0	0	0
Properti Investasi	21,349,361,185	0	21,349,361,185
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-4,000,513,596	0	-4,000,513,596
Jumlah Properti Investasi	17,348,847,589	0	17,348,847,589
PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	0	0	0
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	18,240,748	0	18,240,748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-91,204	0	-91,204
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	0	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	18,149,544	0	18,149,544
ASET LAINNYA	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	15,930,603,312	0	15,930,603,312
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0



Dana yg Dibatasi Penggunaannya	32,392,974,634	0	32,392,974,634
Dana Penjaminan	0	0	0
Dana Kelolaan BLU	0	0	0
Aset Lain-lain	23,198,100,000	0	23,198,100,000
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	0	0	0
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-15,811,118,780	0	-15,811,118,780
Jumlah Aset Lainnya	55,710,559,166	0	55,710,559,166
JUMLAH ASET	2,042,352,283,114	-202,211,164	2,042,150,071,950
KEWAJIBAN	0	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	32,662,792,519	0	32,662,792,519
Utang Kepada Pihak Ketiga II	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	9,699,939,032	0	9,699,939,032
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	42,362,731,551	0	42,362,731,551
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	0	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	0	0
Kewajiban Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	42,362,731,551	0	42,362,731,551
EKUITAS	1,999,989,551,563	-202,211,164	1,999,787,340,399
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,042,352,283,114	-202,211,164	2,042,150,071,950



LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,315,299,032	0	5,315,299,032
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,315,299,032	0	5,315,299,032
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5,315,299,032	0	5,315,299,032
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	82,459,343,914	0	82,459,343,914
Beban Persediaan	1,929,935,507	-154,066	1,929,781,441
Beban Barang dan Jasa	122,331,457,751	0	122,331,457,751
Beban Pemeliharaan	10,365,420,525	18,013,080	10,383,433,605
Beban Perjalanan Dinas	32,686,929,891	0	32,686,929,891
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30,533,495,316	11,610,498	30,545,105,814
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-80,112,841	0	-80,112,841
Beban Transfer	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	280,226,470,063	29,469,512	280,255,939,575
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-274,911,171,031	-29,469,512	-274,940,640,543
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-770,750,273	0	-770,750,273
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	495,987,393	0	495,987,393
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,266,737,666	0	1,266,737,666
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,425,095,006	-43,732,952	1,381,362,054
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,426,745,006	131,572,800	1,558,317,806
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,650,000	175,305,752	176,955,752
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	654,344,733	-43,732,952	610,611,781
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-274,256,826,298	-73,202,464	-274,330,028,762
POS LUAR BIASA	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	-274,256,826,298	-73,202,464	-274,330,028,762



LAPORAN PEERUBAHAN EKUITAS (LPE)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
EKUITAS AWAL	1,989,182,706,494	0	1,989,182,706,494
SURPLUS/DEFISIT-LO	-274,256,826,298	-73,202,464	-274,330,028,762
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-199,327,158	-129,008,700	-328,335,858
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-196,167,038	-129,008,700	-325,175,738
LAIN-LAIN	-3,160,120	0	-3,160,120
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	285,262,998,525	0	285,262,998,525
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,806,845,069	-202,211,164	10,604,633,905
EKUITAS AKHIR	1,999,989,551,563	-202,211,164	1,999,787,340,399

INFORMASI REKENING KEMENTERIAN



DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2024

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	BA-Es.I	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang (Rp)
1	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Induk (Giro)	202.001.000.262.307	RKK KEMENTERIAN BUMN.OPS	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0
2	Kementerian BUMN (606538)	Kementerian BUMN (041)	Kementerian BUMN (01)	Rekening Induk (Giro)	650.796.065.381.000	BPG 019 KEMENT.BUMN	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	BRI KCP KEMENTERIAN BUMN	0